

**LAPORAN AKHIR TAHUN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**(PTUPT)**



**INTERNASIONALISASI USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI  
POLA SUBKONTRAK DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**  
*(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)*

**TAHUN KEDUA DARI RENCANA 2 TAHUN**

**FIFI JUNITA, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. (NIDN. 0026067002)**  
**Dr INTAN INNAYATUN SOEPARNA, S.H., M.Hum (NIDN. 0050675002)**  
**YUNIARTI, S.H., M.H., LL.M. (NIDN. 0012058502)**

**DIBIYAI OLEH:**  
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOVEMBER 2018**

**LAPORAN AKHIR TAHUN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**(PTUPT)**



KKB  
KK-2  
lp. 18/19  
Jun  
i

**INTERNASIONALISASI USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI  
POLA SUBKONTRAK DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)**

**TAHUN KEDUA DARI RENCANA 2 TAHUN**

**FIFI JUNITA, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. (NIDN. 0026067002)**  
**Dr INTAN INNAYATUN SOEPARNA, S.H., M.Hum (NIDN. 0050675002)**  
**YUNIARTI, S.H., M.H., LL.M. (NIDN. 0012058502)**

**DIBIYAI OLEH:**  
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOVEMBER 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : INTERNASIONALISASI USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGGAI (UMKN) MELALUI POLA SUBKONTRAK DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : FIFI YUNITA, S.II., LL.M, M.H, Ph D  
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
 NIDN : 0026067002  
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor HP : 081235546256  
 Alamat surel (e-mail) : fifijunita26@gmail.com



**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Dr INTAN INNAYATUN SOEPARNA S.H., M.Hum  
 NIDN : 0005067513  
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

**Anggota (2)**

Nama Lengkap : YUNIARTI S.H., M.H  
 NIDN : 0012058502  
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

**Institusi Mitra (jika ada)**

Nama Institusi Mitra : -  
 Alamat : -  
 Penanggung Jawab : -  
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 100,000,000  
 Biaya Keseluruhan : Rp 200,000,000

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga



(Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. )  
 NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 12 - 11 - 2018  
 Ketua,



( FIFI YUNITA, S.H., LL.M, M.H, Ph D)  
 NIP/NIK 197006261998022001

Menyetujui,  
 Ketua LPI Universitas Airlangga



(Prof. Hery Purnobasuki, Drs. M.Si., PhD.)  
 NIP/NIK 196705071991021001

## RINGKASAN

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Small and Medium Enterprises/SMEs) di Indonesia hingga saat ini belum mencapai taraf internasionalisasi secara maksimal. Kondisi ini tentu saja tidak sejalan dengan semakin pesatnya globalisasi maupun regionalisasi ekonomi di kawasan ASEAN. Munculnya ide pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada prinsipnya memberikan peluang (opportunities) maupun tantangan (challenges) bagi pengusaha kecil maupun menengah (SME). Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi dan sistematis (*systematic integrated policy model*). Penelitian ini berupaya untuk memberikan suatu bentuk model kebijakan baik di tingkat nasional, regional maupun secara terintegrasi dan bentuk/model hubungan kontraktual dalam upaya internasionalisasi industri kecil dan menengah untuk menghadapi peluang pasar bebas di ASEAN. Untuk mewujudkan kebijakan secara sistematis, maka internasionalisasi harus dipahami sebagai suatu proses yang dimulai dengan pre condition environment dan diikuti dengan 'strengthening stage' (penguatan inovasi dan daya saing UMKM). Munculnya Global Value Chain (GVCs) telah memperluas peluang UMKM untuk berperan di dalam international production network melalui proses outsourcing. Namun, peluang ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung dengan kebijakan dan policy measures yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan model 'systematic integrated policy model' sebagai salah satu upaya untuk memperluas internasionalisasi UMKM di era pasar global dan AEC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan teoritis maupun praktis (theoretical and empirical approaches). Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) model kebijakan pemerintah dalam upaya internasionalisasi UMKM dalam kerangka AEC (Asean Economic Community).

Kata kunci: internasionalisasi, industri kecil dan menengah (SMEs), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), pola sub kontrak

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmatNya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul Internasionalisasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penelitian ini dilaksanakan atas pembiayaan Menteri Research dan Teknologi, Pendidikan Tinggi.

Laporan kemajuan ini disusun untuk memenuhi salah satu luaran penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penelitian. Penulisan laporan kemajua ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan partisipasi semua tim peneliti dan semua pihak yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini.

November 2018,

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>		8
• 1. Latar Belakang		8
• 2. Rumusan Masalah		8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>		11
• 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Cultural and Creative Industries (CCI)		9
• 2. Teori-Teori Internasionalisasi UMKM		12
• 3. Perlunya 'Integrated Policy Model' dalam Internasionalisasin UMKM sektor Cultural and Creative Industries (CCI)		14
• Pola Subkontrak		12
• Kegiatan Internasionalisasi UMKM		13
• Kerangka Konseptual 'Integrated Policy Model'		13
<b>BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>		14
<b>BAB 4 METODE PENELITIAN</b>		15
• 1. Tipe Penelitian		30
• 2. Pendekatan Penelitian		30

<b>BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>15</b>
• Analisa Kebijakan Pemerintah dalam Internasionalisasi UMKM.....	16
• Kebijakan Internasionalisasi UMKM dan Hambatannya.....	18
• Analisa Kesenjangan (Gap) Kebijakan Internasionalisasi UMKM.....	19
• Strategic Linkage antara Perusahaan Multinasional, Pemerintah, UMKM .....	20
• Kerangka Pelaksanaan Integrated Policy Model .....	21
<b>BAB 6 PERKEMBANGAN GVCs (GLOBAL VALUE CHAINS) DALAM KERANGKA MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN).....</b>	<b>22</b>
<b>BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>30</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
• LAMPIRAN 1. Buku ISBN.....	72
• LAMPIRAN 2.Proceedings konferensi internasional.....	73
• LAMPIRAN 3.Sertifikat konferensi internasional .....	74
• LAMPIRAN 4.Sertifikat konferensi internasional .....	75
• LAMPIRAN 5 Workshop FGD.....	76
• LAMPIRAN 6 Journal Article Submission.....	77
• LAMPIRAN 7 Sertifikat Konferensi Internasional .....	78

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Data statistik terkait dengan perkembangan kultural dan kreatif ekonomi di Indonesia di tahun 2016 menunjukkan peningkatan kontribusinya terhadap GDP yaitu dari 525.96 trillion menjadi 852.24 trillion (meningkat sekitar 10.14% per tahun). Nilai ini berkontribusi pula terhadap peningkatan ekonomi nasional mulai dari 7.38% menjadi 7.66%, yang didominasi oleh tiga sub sektor yaitu kuliner 41.69%, fashion 18.15%, dan kerajinan sekitar 15.70%. Potensi terbesar eksport atas komoditi ekonomi kreatif pada tahun 2015 adalah United States 31,72% then Japan 6,74%, dan Taiwan 4,99%. Untuk sektor kreatif pada periode 2010-2015 telah mengalami peningkatan yaitu sekitar 2.15%, yang mana jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 15.9 million. (Data Statistik, 2016). Selain itu, potensi pengembangan ekonomi kreatif juga didukung oleh dinobatkannya beberapa kota di Indonesia seperti Surakarta, Bandung, Yogyakarta and Pekalongan sebagai UNESCO's Creative Cities Network for design and arts. Hal ini menjadi langkah positif dalam melakukan konsolidasi peran budaya dalam pengembangan ekonomi nasional.

Pentingnya internasionalisasi UMKM telah dikaji dan diteliti oleh beberapa penelitian. Internasionalisasi UMKM merupakan faktor yang sangat krusial untuk meningkatkan potensinya dalam peningkatan ekonomi nasional. Namun, penelitian terkait dengan internasionalisasi UMKM di sektor kultural dan kreatif ekonomi belum mendapat perhatian yang memadai. *Previous research*

*demonstrated that internationalization is a crucial strategic alliance for developing SMEs in global era. (Masum & Fernandez, 2008) Elemen yang terpenting di dalam proses internasionalisasi adalah bagaimana untuk menciptakan 'linkage' melalui kerangka kebijakan strategis (strategic policy framework) yang dapat mengatasi berbagai hambatan terkait dengan 'information barriers, enabling SMEs to becoming more attractive partners and to benefit from partnership and encouraging MNEs to forge linkage with local enterprise' (Hodgkinson, 2000) In order to internationalize the cultural and creative industries, government policy has a huge influence, in order to develop precondition and create strategic policy and institutional framework that support and strengthen SMEs in CCIs. (European Union, 2012) Internasionalisasi UMKM juga bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menciptakan suatu 'strategic measure' yang dapat menciptakan 'favorable and conducive environment' untuk mengembangkan UMKM di sektor kultural dan kreatif ekonomi melalui penciptaan network antara UMKM dan perusahaan besar melalui partnership atau kerja sama/joint venture.*

*The research on integrated policy framework about the strengthening of SMEs in CCIs in Indonesia is very limited. Until now, there is not many references of policy measures related to internationalization of SMEs in CCIs through the establishment of linkage and subcontracting strategies. (Aulia & Haryanto, 2016)*

Mengingat sedikitnya penelitian di bidang ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembentukan kebijakan

pemerintah yang lebih terintegrasi/terpadu dalam rangka internasionalisasi UMKM di sektor kultural dan kreatif industri.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mapping kebijakan pemerintah dalam rangka internasionalisasi UMKM sektor kultural dan ekonomi kreatif.
2. Menganalisa kesenjangan (*gap analysis*) dari berbagai kebijakan pemerintah di bidang internasionalisasi UMKM sektor kultural dan ekonomi kreatif.
3. Model kebijakan nasional secara terpadu (*comprehensive government policy*) dalam kerangka pencapaian internasionalisasi UMKM sektor kultural dan kreatif industri.
4. Pengintegrasian prinsip internasionalisasi UMKM dalam perjanjian kerjasama ekonomi regional di kawasan Asean dan upaya review terhadap berbagai peraturan perundangan terkait dengan ekspor, impor, *sub contracting* maupun FDI terhadap pengadopsian konsep internasionalisasi UMKM.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dikategorikan sebagai UMKM ditentukan kriteria usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah.

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal tersebut diatas memberikan batasan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dengan mendasarkan pada jumlah kekayaan bersih atau modal yang dimiliki dan juga didasarkan pada jumlah penjualan tahunan maksimal Rp 50 milyar. Selain kategori tersebut diatas dianggap sebagai perusahaan besar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009, kreatif ekonomi diartikan secara luas yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ruang lingkup sektor industri kreatif juga diartikan secara luas yaitu mencakup 16 sub sektor industri yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, aplikasi dan game developer, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa serta televisi dan radio. Hal ini dapat dicermati di dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015. Luasnya sub sektor bidang ekonomi kreatif memerlukan kebijakan yang strategis dalam rangka untuk melakukan internasionalisasi atas UMKM di sektor ini.

## **2. Teori-Teori Internasionalisasi UMKM**

Internasionalisasi UMKM pada prinsipnya didasarkan pada tiga teori, yang meliputi : (1) model Uppsala; (2) Network approach dan (3) teori 'New Ventures'

atau 'born global' approach.<sup>1</sup> Model 'uppsala' merupakan suatu bentuk teori yang menerangkan bagaimana suatu perusahaan secara bertahap memperkuat peran sertanya di pasar global (*foreign market*).<sup>2</sup> Teori ini menekankan pada proses internasionalisasi secara bertahap oleh UMKM. Berdasarkan teori ini, maka UMKM yang belum berorientasi ekspor akan memulai secara bertahap melalui suatu bentuk kerja sama (*joint venture*), lisensi (*licensing*) atau franchise. Teori 'network approach' lebih menekankan pada pentingnya unsur penciptaan jaringan (*network*) dalam upaya untuk mewujudkan internasionalisasi. Sedangkan teori 'International New Ventures/born global' lebih menekankan pada UMKM yang sejak awal sudah terlibat dalam transaksi bisnis secara internasional.<sup>3</sup> Dari ketiga bentuk teori tersebut, internasionalisasi UMKM di Indonesia belum menunjukkan jumlah/prosentase yang signifikan. Bahkan jumlah UMKM yang berhasil menembus pasar global sangat rendah, sehingga perlu adanya suatu model kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk *regulatory measures* maupun *incentives* dan model kontrak yang dapat mendukung internasionalisasi UMKM dalam kerangka kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

Selain ketiga metode tersebut di atas, dikenal juga beberapa teori internasionalisasi UMKM yang meliputi teori internalisasi (*internalization theory*)

---

<sup>1</sup> Nik Ab Halim, Nik Abdullah dan Shahrul Nizam Mohd Zain, The Internationalization Theory and Malaysian Small Medium Enterprises (SMEs), *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2011, h. 319.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

dan teori elektic (*electic theory*).<sup>4</sup> Dikaitkan dengan ketiga teori di atas nampak bahwa pemberdayaan UMKM dan upaya internasionalisasi UMKM di Indonesia belum sampai ke arah metode 'Born Global' (INV). Oleh karena itu, secara bertahap dengan melalui pola sub kontrak yang juga didukung dengan kebijakan pemerintah secara nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama regional diantara negara di kawasan Asean, maka dimungkinkan untuk mewujudkan upaya internasionalisasi terhadap UMKM. Internasionalisasi UMKM disini meliputi baik di bidang ekspor impor, FDI (*Foreign Direct Investment*) maupun pola sub contracting dengan pihak asing.

### **3.Pola Sub Kontrak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM diatur tentang bentuk-bentuk pola kemitraan, yang salah satunya adalah pola sub kontrak. Namun, pembentukan kontrak antara UMKM dengan pengusaha besar melalui pola sub kontrak haruslah dicermati, mengingat seringkali para pihak didudukkan pada posisi yang tidak seimbang (*imbalance position*) yang berakibat isi dari kontrak sub kontrak tersebut cenderung lebih memberikan keuntungan bagi pihak pengusaha besar. Oleh karena itu, perlu diberikan suatu pedoman pembentukan kontrak dengan pola sub kontrak agar lebih menjamin keseimbangan dan perlindungan hukum bagi pihak pengusaha besar maupun UMKM.

---

<sup>4</sup> Herlina, Yoka Roida, *Internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, dapat diakses di <http://iddocz.com/doc/22721/internasionalisasi-usaha-mikro--kecil--dan-menengah--umkm..>, h. 7, diakses tanggal 15 April 2015.

Beberapa data yang diperoleh, ternyata kontrak yang dibuat antara UMKM dengan pengusaha besar berdasarkan pola sub kontrak tidak mencerminkan adanya suatu kemitraan. Hal ini tentu saja tidak akan menjamin upaya untuk internasionalisasi UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya review terhadap berbagai kontrak antara pengusaha dengan UMKM yang mendasarkan pada prinsip kemitraan baik di tingkat nasional maupun pola *sub contract* di tingkat internasional, termasuk regional. Perlu adanya suatu bentuk pedoman pembentukan kontrak kemitraan dengan pola sub kontrak yang dibuat antara pengusaha besar dengan UMKM dengan juga mengadakan studi komparatif yang berlaku di negara Uni Eropa maupun Asia.

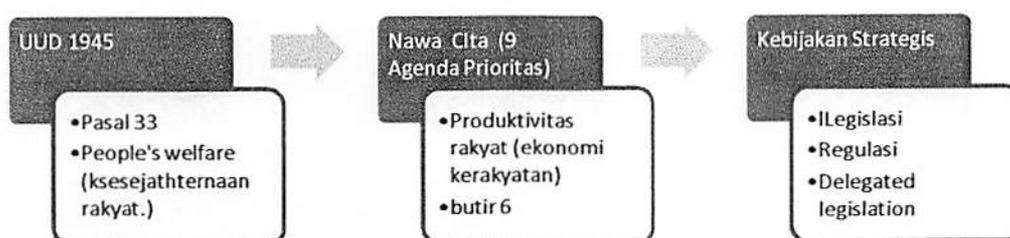
#### 5. Mapping Kebijakan Internasionalisasi UMKM sektor budaya/kultural dan ekonomi kreatif

Table 1. Government Policy in the internationalization of SMEs

Government Policy	Policy program	Target
Ministry of Cooperative and SMEs	RPJP - National Development Plan 2005-2025	1. creating competitiveness of SMEs in international sphere
Ministry of Industry	SMESCO (Small and Medium Enterprises and Cooperative)	a professional service facilitate business partners to produce world-class flagship products high quality and promote the Indonesian SMEs

		to local business partners as well as international.
<b>Ministry of Cooperative and the Indonesian Export Financing Institution (LPEI)</b>	<b>Financial assistance for export</b>	<b>Increase the export competitiveness of SMEs</b>
<b>Minister of Cooperative and SMEs (Government Regulation No. 46/2013)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Income Tax incentive for SMEs</li> <li>2. Research and Development support</li> <li>3. Branding</li> <li>4. Technology support</li> <li>5. Transportation system</li> <li>6. Market access and tariff negotiation through regional and international trade agreement (WTO)</li> </ol>	<b>Increase competitiveness of the SMEs</b>
<b>Regional Cooperation</b>	<b>ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) (The ASEAN secretariat, 2015)</b>	<b>Increasing networking</b>

Pola kebijakan internasionalisasi UMKM sektor kultural dan kreatif industri didasarkan pada ‘fundamental political economy’ yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (people’s welfare) melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Politik ekonomi ini selanjutnya diadopsi di dalam Nawa Cita (9 Agenda Prioritas) yang pada prinsipnya ditujukan untuk mengembangkan produktivitas kerakyatan. Berikut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



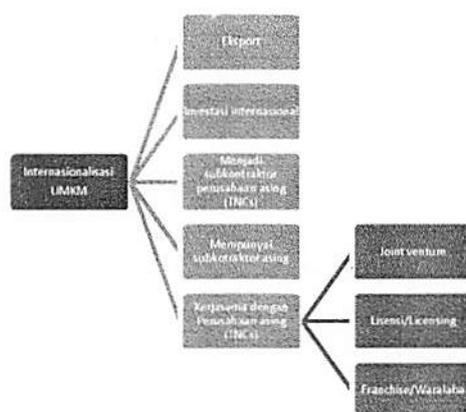
Kebijakan strategis sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarkhi peraturan perundang-undangan yang sangat luas yang meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu adanya model kebijakan yang bersifat terpadu/terintegrasi (integrated policy) untuk menghindari adanya kebijakan yang saling bertentanga, overlap maupun omission. Oleh karena itu, internasionalisasi industri kultural dan kreatif harus dipahami sebagai suatu proses yang mencakup tahap 'pre condition', tahap 'strengthening' (financial and capability) dan tahap 'supporting major.' Strategi nasional kebijakan pemerintah harus melingkupi keseluruhan proses tersebut secara terpadu.

#### **Kegiatan Internasionalisasi UMKM**

Pada umumnya, proses internasionalisasi UMKM selalu diorientasikan pada kegiatan ekspor sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi yang bersifat internasional (lintas Negara/cross border) yang juga ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Namun, dalam perkembangannya, proses internasionalisasi tidak hanya didasarkan semata-mata dengan kegiatan ekspor saja yang dapat meningkatkan keuntungan yang bersifat kompetitif. Diantaraya adalah bentuk 'partnership' dengan berbagai perusahaan asing, investasi asing (foreign investment) dan jaringan lintas negara (crossborder networking) juga dapat

memfasilitasi pertukaran teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan bagi UMKM untuk membentuk strategi bisnis yang kuat.

Terdapat beberapa bentuk kegiatan internasionalisasi UMKM, diantaranya: (1) export (direct export); import; investasi asing; subkontrak dengan perusahaan asing; mempunyai subkontraktor asing; kerjasama dengan perusahaan asing melalui pola joint venture, non equity alliance, licensing, keagenan, dan franchising (waralaba). 17 Kategorisasi internasionalisasi dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



### 1. Ekspor dan Impor

Dikenal juga sebagai 'direct' import dan 'direct export' yang merupakan bentuk yang mendasar dan secara tradisional telah dikategorikan sebagai kegiatan internasionalisasi karena menciptakan akses terhadap pasar internasional. UMKM juga memulai kegiatan internasionalisasi ini juga diawali dengan pelaksanaan impor suatu barang tertentu dari negara lain. Proses ekspor impor ini juga

melibatkan pertukaran (exchange) barang maupun jasa secara lintas negara (cross border) sehingga dikategorikan juga sebagai proses internasionalisasi.

#### 1. Investasi asing

Kegiatan investasi asing ini meliputi (1) Foreign Direct Investment (investasi langsung) dan investasi tidak langsung atau investasi dalam bentuk portfolio (Foreign Portfolio Investment). FDI melibatkan penanaman modal perusahaan di suatu negara tertentu (home state) di negara lain (host state) dalam jangka panjang. Sedangkan FPI tidak melibatkan pembentukan perusahaan PMA di dalam wilayah teritorial suatu negara tertentu dengan menanggung segala bentuk risikonya, tetapi hanya melibatkan pembelian saham dari suatu perusahaan asing sehingga tidak ada kepemilikan equity.

#### 1. Menjadi subkontraktor dari perusahaan asing

Sebagai akibat perkembangan jaringan produksi (production network) dan 'value chain' maka kegiatan bisnis semakin benuansa global dan UMKM semakin menjajaki peluang untuk menjadi subkontraktor dari perusahaan asing. Subkontraktor merupakan salah satu bentuk metode outsource dimana pihak subkontraktor menjalankan bagian tertentu dari suatu proses produksi barang maupun jasa. Dalam proses ini, maka sebagai proses produksi diserahkan pada pihak subkontraktor (proses outsourcing). Misalnya: Perusahaan coca cola menyerahkan pengerjaan salah satu proses produksinya yaitu kaleng stainless steel pada perusahaan lain (UMKM). Pola ini dapat membantu UMKM untuk membangun proses internasionalisasi dengan perusahaan asing atau menciptakan 'global value chain' (GVC)

### 1. Mempunyai subkontraktor asing

Memperkerjakan subkontraktor asing melalui pola outsourcing untuk suatu kegiatan dalam proses produksi juga merupakan upaya untuk melakukan internasionalisasi. Hal ini misalnya dilakukan dengan menunjuk seorang agen atau perwakilan perusahaan (representative) di negara tertentu untuk memasarkan produk (distribusi produk).

### 1. Kerjasama dengan perusahaan asing, yang meliputi :

#### i. Joint Venture

Joint venture dapat dibedakan menjadi (1) contractual joint venture yang mana tidak diikuti dengan pembentukan perusahaan joint venture sehingga tidak ada equity ownership. Bentuk ini juga terkait dengan 'non equity alliances' yang mana kerjasama tidak melibatkan adanya equity; (2) equity joint venture, yang mana diikuti dengan pembentukan perusahaan joint venture sehingga terdapat kepemilikan equity atas perusahaan yang dibentuk. Dalam joint venture terdapat unsur inbreng (pemasukan modal) oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dan diatur mengenai prosentasi pembagian keuntungan berdasarkan pada pemasukan modal yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

#### (ii) Lisensi/Licensing

Dalam proses ini, maka UMKM memberikan ijin/lisensi bagi perusahaan asing atau sebaliknya untuk menggunakan IPR (merek/trademark) yang dimilikinya selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran royalty.

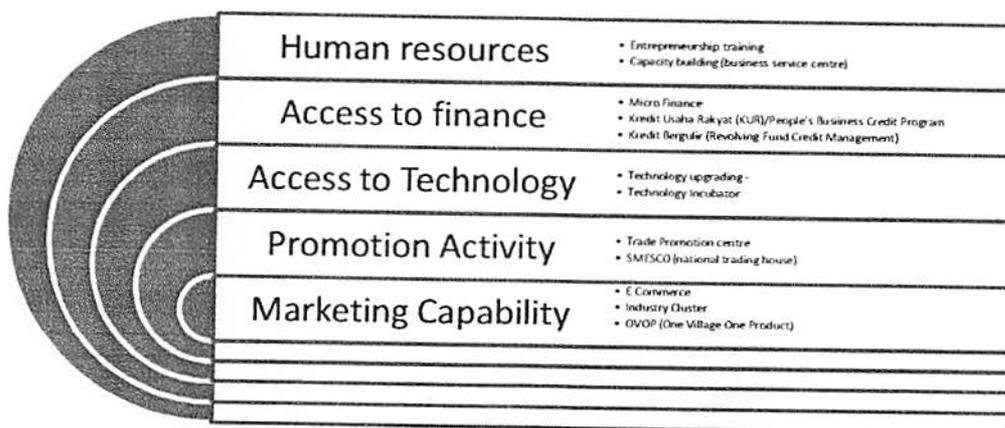
#### (iii) Waralaba/Franchise

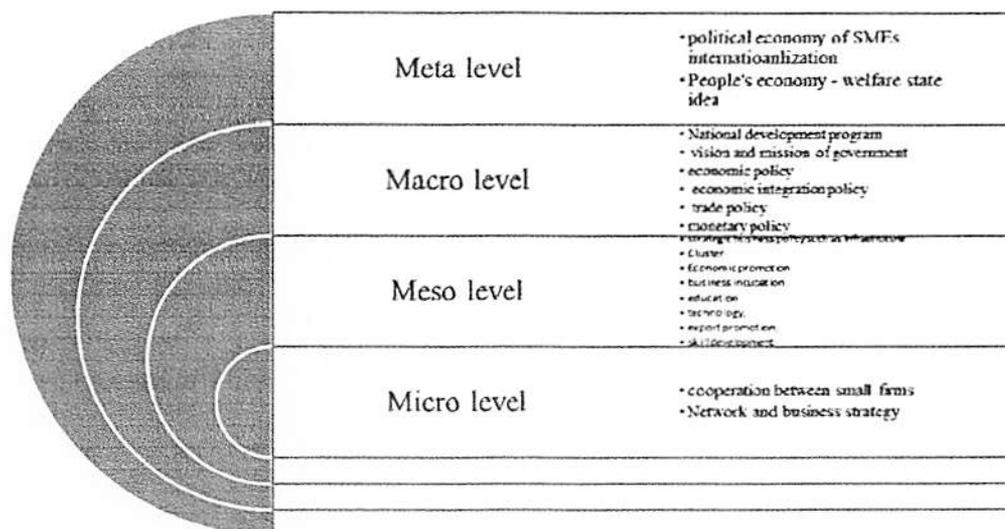
UMKM memperoleh izin untuk menggunakan IPR milik dari Franchisor untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu dengan imbalan pembayaran royalty.

Pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi (digitalisasi, e commerce), perubahan politik dan ekonomi merupakan beberapa factor yang memicu perkembangan internasionalisasi UMKM. Beberapa teori tentang internasionalisasi UMKM merujuk pada internasionalisasi sebagai suatu proses (*stage model*) yang berlangsung secara bertahap yang dimulai dari tahap 'no exporting, exporting via agent hingga menjadi perusahaan global (*global firm*). Namun, teori yang lain (*born global theory*) lebih menekankan pada proses internasionalisasi bukan sebagai proses tetapi lebih mengarah pada suatu konsep bahwa UMKM sejak awal mula pembentukannya sudah merupakan perusahaan global (*born global*) dan sudah bersifat internasional sejak awal pembentukannya. Pendekatan 'born global' dalam penelitian ini merupakan tujuan dan arah jangka panjang proses internasionalisasi UMKM. Jadi beberapa teori/ pendekatan internasionalisasi UMKM di atas membawa implikasi adanya pengkategorian UMKM yaitu teori Uppsala, networking dan international entrepreneurship mengarah pada internasionalisasi UMKM sebagai suatu proses yang berlangsung secara bertahap (*stage model*) atau yang dikenal juga dengan 'incremental internationalization SMEs'.<sup>20</sup> Sedangkan pendekatan 'born global' lebih mengarah pada terbentuknya UMKM yang sejak awal pembentukannya sudah berorientasi ekspor (*global firm*) sehingga dikenal dengan 'born global SMEs.'

### 1. Kerangka Konseptual ‘Integrated Policy Model’ Internasionalisasi UMKM

Model ini didasarkan pada upaya untuk membentuk kebijakan yang terintegrasi dari keseluruhan aspek yang mempengaruhi proses interanasionalisasi sebagai suatu proses yang dimulai dari tahap ‘pre condition’ hingga tahap ‘strengthening’ (penguatan) kemampuan UMKM. Kerangka internasionalisasi ini harus dilaksanakan secara terpadu/ terintegrasi yang memadukan berbagai elemen yang meliputi permodalan/ pembiayaan, SDM, pemasaran, infrastruktur/teknologi maupun kelembagaan. Kerangka konsep ‘integrated policy model’ dalam rangka internasionalisasi UMKM dapat digambarkan dalam skema berikut ini:





Tabel: Kebijakan internasionalisasi UMKM secara sectoral (Macro level)

Berdasarkan skema di atas, dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan proses internasionalisasi, maka perlu adanya suatu ‘comprehensive framework’ untuk memahami paoses dan dinamika internasionalisasi SMEs. Masih terdapat kesenjangan (gap) dalam proses internasionalisasi sehingga berakibat kebijakan pemerintah terkait internasionalisasi SMEs menjadi tidak efektif.

*A review of literature in internationalization has demonstrated that it is lacking a comprehensive framework for understanding the process and dynamics of firms’ internationalization over time.<sup>5</sup>*

Berdasarkan review terhadap upaya proses internasionalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam bentuk berbagai fasilitas maupun regulasi, masih terdapat kesenjangan terkait dengan belum adanya

<sup>5</sup>Nana Osei Bonsu, Re-Conceptualizing Internationalization of SMEs as an Entrepreneurial Process, International Business Management 10 (1): 38-50, 2016, p. 48.

pengintegrasian keseluruhan proses internasionalisasi mulai dari ‘pre condition’ hingga ‘strengthening’ dan pengintegrasian keempat teori internasionalisasi yang mencakup pengetahuan pasar global, penciptaan jaringan (network) maupun entrepreneurial behaviour untuk mempercepat proses internasionalisasi SMEs dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

*‘the entire process could depends on a firm’s starting conditions including its prior knowledge, how it is embedded in networks of relations with other actors and the firm’s willingness to engage in international behaviour involving the commitment of time and resources to international market oppoportunities.’*

*Therefore the researcher and practitioners should consider the integration of both internationalization and entrepreneurship in order to capute and understand fully how SMEs identify foreign market opportunities and internationalize their operations. <sup>6</sup>*

Kerangka konseptual dalam bentuk ‘integrative policy model’ berupaya untuk mengintegrasikan ketiga teori internasionalisasi secara komprehensif yang selanjutnya diimplementasikan dalam pembentukan berbagai kebijakan internasionalisasi yang dimulai dari tahap awal (*pre condition*) hingga tahap penguatan (*strengthening*) sehingga tidak terdapat gap mengingat internasionalisasi merupakan suatu proses. Tanpa adanya kebijakan yang terkait dengan upaya untuk menciptakan ‘pre condition’ yang kondusif, maka pelaku proses internasionalisasi khususnya UMKM pada umumnya tidak paham mengenai pasar luar negeri dan

---

<sup>6</sup> Ibid.

cenderung untuk menghindari risiko kegagalan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, pengintegrasian teori uppsala dan international entrepreneurial dapat meningkatkan 'international awarness' dan 'capability' dari UMKM.

Mengingat kebijakan pemerintah dalam rangka internasionalisasi UMKM tercakup dalam berbagai regulasi yang sangat luas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang meliputi UUD, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Presiden, termasuk peraturan daerah dan pada umumnya bersifat sektoral, maka sangat esensial untuk dilakukan 'pre-condition stage' yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif (favourable) dalam proses internasionalisasi UMKM. Penentuan strategi kebijakan dalam bentuk fasilitas maupun regulasi akan efektif jika didasarkan pada pemahaman yang jelas terkait dengan karakteristik UMKM di berbagai daerah melalui analisis SWOT. Oleh karena itu, tahap awal untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan internasionalisasi UMKM di tingkat nasional (termasuk daerah/ propinsi) maupun regional di kawasan Asean, maka perlu adanya mapping untuk mengidentifikasi area yang potensial untuk dikembangkan yang selanjutnya dituangkan dalam strategi ekonomi dan politik. Tidak adanya pendekatan secara integratif dalam pembentukan kebijakan internasionalisasi UKM hanya bersifat alokatif seperti program pengembangan sistem pendukung usaha mikro, program pengembangan keterampilan pelaku usaha, sedangkan kebijakan yang bersifat regulatif terhadap pemberdayaan UKM seperti program penguatan kelembagaan koperasi dan program pengembangan iklim usaha, yang memperkuat struktur pasar UKM dan mengubah perilaku pelaku pasar UKM masih kurang

memadai. Kebijakan UKM belum mampu untuk bersifat regulatif untuk mendorong peningkatan pangsa pasar UKM dan merubah perilaku pelaku pasar untuk mempersiapkan diri menuju proses internasionalisasi.<sup>25</sup> Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam bentuk fasilitas dan regulasi yang mendukung proses internasionalisasi UKM, namun belum maksimal untuk meningkatkan daya saing UKM di kawasan regional. Hal ini utamanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) sasaran program-program yang dirancang pemerintah belum sesuai dengan tingkat kesiapan UKM untuk melakukan proses internasionalisasi; (2) sasaran pendukung pelaksanaan program pemerintah yang telah ada hanya dapat dimanfaatkan oleh UKM yang telah benar-benar siap untuk melakukan internasionalisasi sehingga kebijakan tersebut belum menyentuh UKM yang ada di Indonesia secara menyeluruh. <sup>26</sup>Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang telah ada sejauh ini hanya menyelesaikan masalah UKM secara parsial (sektoral/alokatif) namun tidak terlaksana secara lintas bidang sehingga terjadi tumpang tindih (overlap) atau bahkan terjadi in konsistensi sehingga membebani kegiatan bisnis UKM. Disamping itu, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UKM cenderung berorientasi jangka pendek sehingga akar permasalahan.



### **BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Menghasilkan sistem/model internasionalisasi UMKM melalui pembentukan kebijakan secara sistematis dan terintegrasi.
- b. Memberikan pemahaman internasionalisasi sebagai suatu proses yang dimulai dari pre condition environment melalui analisa SWOT untuk mengetahui pemetaan kekuatan UMKM di masing-masing region dan menciptakan ‘internationalization awareness’ dan peluang untuk berperan aktif dalam jaringan produksi GVC (Global Value Chains). Selanjutnya diikuti dengan tahapan penguatan UMKM (strengthening) dengan memberikan kebijakan secara terintegrasi di bidang permodalan, SDM, teknologi, pemasaran, diversifikasi pasar untuk meningkatkan daya saing dan inovasi.
- c. Meningkatkan ‘strategic linkage’ antara UMKM, Perusahaan dan Pemerintah melalui konsep ‘triangle linkage.’
- d. Meningkatkan pemahaman bahwa internasionalisasi merupakan ‘cross cutting issue’ sehingga pembentukan kebijakan tidak lagi bersifat sektoral atau alokatif tetapi lebih bersifat terpadu dan harus dilakukan secara institusional untuk menjamin keberlangsungan (sustainability).

#### **2. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian dalam bentuk model ‘systematic integrated policy’ dalam kerangka internasionalisasi UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan

**UMKM dapat berkontribusi secara aktif dalam jaring produksi (production network) di era GVCs untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan GDP nasional.**



## BAB 4 METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan secara teoritis (theoretical approach) maupun pendekatan empiris (empirical approach). Pendekatan teori dilakukan dengan menelaah/menganalisis secara kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah penelitian untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui survey dan wawancara dengan stakeholder terkait dengan isu hukum dalam penelitian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari berbagai literatur hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, diantaranya buku, jurnal, online sources dsb. Termasuk juga hasil survey dan wawancara dengan stakeholders terkait dengan isu hukum yang diteliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu (1) pendekatan peraturan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan komparatif. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum

penelitian. Pendekatan konseptual merujuk pada berbagai doktrin hukum, konsep maupun asas hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan suatu aturan hukum maupun pola kebijakan pemerintah terkait dengan internasionalisasi UMKM. Pendekatan komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan pelaksanaan internasionalisasi di negara lain.

**a. Tahap awal**

Tahap awal dari penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan dan berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan UMKM yang telah ada di Indonesia, untuk mengidentifikasi ada/tidaknya kebijakan internasionalisasi termasuk juga apakah ada kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang justru dapat menghambat pelaksanaan internasionalisasi UMKM.

**b. Tahap Perumusan**

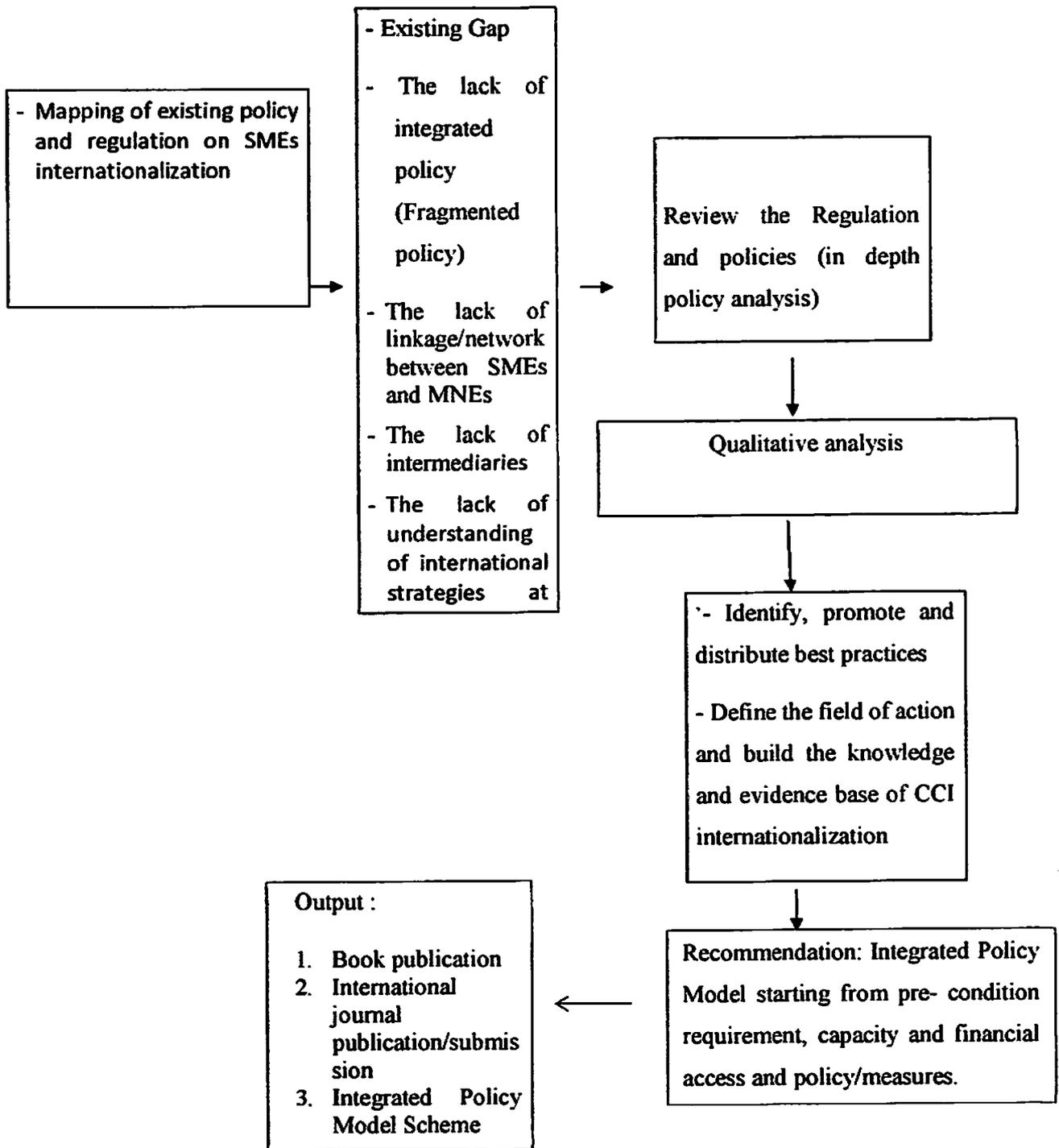
Tahap perumusan akan dilakukan dengan didahului dengan analisa secara kritis terhadap berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah (*delegated legislation*) yang telah ada dengan didukung oleh data survey dan wawancara untuk dapat menjawab isu hukum yang diteliti.

**c. Tahap Akhir**

Tahap akhir setelah analisa adalah rekomendasi penyusunan model kebijakan dan model kontrak terkait dengan upaya internnasionalisasi terhadap UMKM. Tahap akhir juga akan dilakukan melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan

**mendatangkan para ahli yang terkait dengan isu hukum yang telah diteliti.**

**Research Scheme :**



## **BAB 5 KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UMKM YANG BERSIFAT SEKTORAL**

### **A. Kebijakan Internasionalisasi UKM dan Hambatannya**

Keterlibatan UKM dalam proses ekspor dan industrialisasi di berbagai negara terutama di Uni Eropa dan beberapa negara Asia Pasifik seperti Korea, Jepang, India dan China telah menciptakan jaringan produksi (production network) maupun rantai kegiatan ekonomi secara global (GVC/Global Value Chain). Di kawasan regional Asean, internasionalisasi UKM pada prinsipnya telah menjadi prioritas sejak dibentuknya Asia Pacific Economic COoperation Forum yang melibatkan berbagai negara di Asia Pacific. Progam ini kemudian disepakati lebih lanjut di dalam kerangka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2015 yang merupakan bentuk kerjasama untuk menciptakan pasar bebas barang dan jasa di kawasan regiona ASEAN termasuk harmonisasi aturan investasi dan liberalisasi modal maupun tenaga kerja. Namun, rendahnya daya saing UKM lokal untuk bersaing di pasar global masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya : (1) kurangnya market knowledge atau pengetahuan pasar maupun market commitment; (2) kurangnya financial/pembiayaan, termasuknya kurangnya akses untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan; (3) kurangnya infrastruktur/ kelembagaan penunjang; (4) keterbatasan teknologi dan inovasi; (5) keterbatasan kemampuan SDM; (6) persaingan bisnis global (business competition) yang cukup tinggi; (7) kebijakan pemerintah dalam erbagai perjanjian kerjasama dengan negara asing yang tidak berorientasi pada internasionalisasi UKM. Hal yang utama untuk

melakukan internasionalisasi UKM adalah bagaimana untuk meningkatkan daya saing UKM dalam pasar internasional. Peningkatan daya saing UKM dipengaruhi oleh beberapa elemen diantaranya : Kelembagaan, SDM, Infrastruktur dan teknologi, pemasaran, pembiayaan, industri, maupun bahan baku.<sup>29</sup> Kontribusi UKM terhadap pendapatan nasional (PDB), nilai ekspor dan penyedia lapangan kerja sangat potensial. Namun, kontribusi UKM terhadap neraca perdagangan ekspor masih rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Singapore, Malaysia, Filipina, Thailand maupun Vietnam. Dukungan UKM terhadap neraca perdagangan non migas Indonesia mengalami penurunan setiap tahun, bahkan di tahun 2014 nilai penurunannya cukup signifikan yaitu mencapai hampir 890 juta USD.

Tabel : Kebijakan internasionalisasi UMKM pada tahap ‘strengthening stage’

	<b>Policy Formulation</b>	<b>Policy program</b>	<b>Department/Ministries</b>
<b>Capacity building</b>	<b>Presidential Instruction No. 6 of 2007</b>	<b>Entrepreneurship Student Creativity Program</b>	<b>University &amp; Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture</b>
	<b>Instruction No. 6 of 2009</b>	<b>Education in Special school – vocational high school</b>	<b>Ministry of Education and Culture</b>

	Regulation of Ministry of Cooperation and SMEs No. 18 of 2015	National Program for Community Empowerment (NPCE)	Ministry of Cooperation and SMEs (MoCSME)
	Regulation of Ministry of Cooperation and SMEs No. 9 of 2013	Integrated Business Service Centre (IBSC)	Ministry of Cooperation and SMEs
	Regulation of Ministry of Cooperation and SMEs No. 2 of 2008	Business Development Service Provider (BDSP)	Ministry of Cooperation and SMEs
<b>Access to finance</b>	Law No. 1 of 2013	Microfinance Institution	Ministry of Cooperation and SMEs
	Regulation of MoCSME No. 30 of 2007	Venture Capital Institution	MoCSME
	Regulation of MoCSME No. 8 of 2006	Saving and Loans Cooperative Institution	MoCSME
	Regulation of Coordinated Ministry for the Economy No. 9	Supporting Financial	Ministry of Economy and MoCSME

	<b>of 2015 on the Implementation of People's Business Credit Program</b>	<b>Assistance Program</b>	
	<b>Regulation of MoCSME No. 1 of 2014 on the Guidelines of Implementation of Social Assistance for Developing SMEs</b>	<b>Revolving Fund Management Agency (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)</b>	<b>MoCSME &amp; Ministry of Finance</b>
	<b>Regulation of Bank of Indonesia Nol 3 of 2001 on Micro Credit Project</b>	<b>Financial facilities: mentoring guarantee, assurance business premises, access to bank</b>	<b>MoCSME and Ministry of Finance</b>
	<b>Presidential Decree No. 98 of 2014 on Licensing for SMEs</b>	<b>People's Business Credit Program (Kredit Usaha Rakyat/KUR)</b>	<b>-Bank of Indonesia -Guarantor Institution (PT Askrindo) -Bank</b>

	<b>Policy package stage III (October 2015)</b>	<b>Venture Capital Instituion, Industry Financing and People's Business Credit</b>	<b>-Bank of Inodnesi -Industry -Bank</b>
<b>Access Technology</b>	<b>Presidential Regulation No. 27 of 2013 on Development of Business Incubator</b>	<b>-Business Incubator program -Technology incubator</b>	<b>-Ministry of Research and Technology -Ministry of Communication and Informatics</b>
	<b>Presidential Regulation No. 69 of 2014 on Indonesian Broadband Expanding Plan</b>	<b>Broadband Expanding Plan</b>	<b>-Indonesian Institute of Science</b>
	<b>Government Regulation No. 35 of 2007 on Allocating Partial Revenue of Business Entities for Increasing the Capacity of</b>	<b>Allocating Partial Revenue of Business Entittes</b>	<b>The Agency for the Assessment and Application of Technology</b>

	<b>Innovation and Technology</b>		
<b>Promotional activity</b>	<b>Regulation of MoCSME No. 19 of 2016</b>	<b>SMESCO Indonesian Company -marketing services agency for SMEs</b>	<b>MoCSME</b>
	<b>Ministry of Finance No. 159 of 2007</b>	<b>Marketing Cooperative</b>	<b>Ministry of Finance</b>
<b>Network and Cluster</b>	<b>Presidential Instruction No. 6 of 2007</b>	<b>One Village One Product (OVOP) program</b>	<b>-MoCSME -Ministry of Industry -Central Bank of Indonesia (BI)</b>

Sumber: Kemenko Perekonomian, Bekraf (2016)

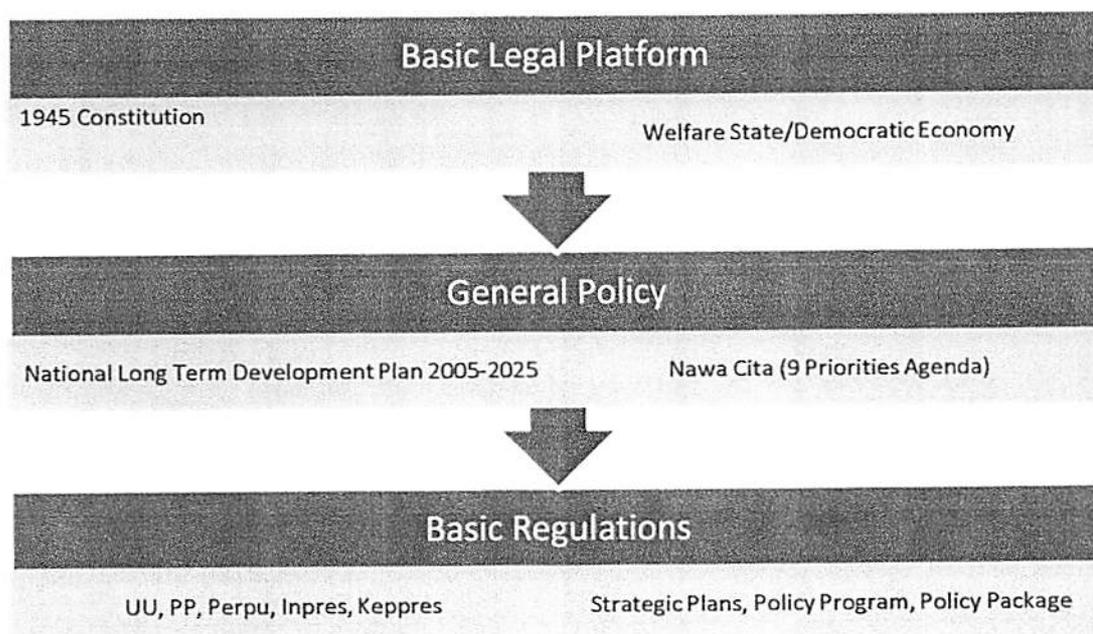
Table 2. Kebijakan internasionalisasi UMKM pada tahap 'Pre-condition stage'

<b>Government Policy</b>	<b>Policy program</b>	<b>Target</b>
<b>Ministry of Cooperative and SMEs</b>	<b>RPJP - National Development Plan 2005-2025</b>	<b>1. creating competitiveness of SMEs in international sphere</b>
<b>Ministry of Industry</b>	<b>SMESCO (Small and Medium Enterprises and Cooperative)</b>	<b>a professional service facilitate business partners to produce world-class flagship products high quality and promote the Indonesian SMEs</b>

		to local business partners as well as international.
Ministry of Cooperative and the Indonesian Export Financing Institution (LPEI)	Financial assistance for export	Increase the export competitiveness of SMEs
Minister of Cooperative and SMEs (Government Regulation No. 46/2013)	-Income Tax incentive for SMEs -Research and Development support -Branding -Technology support -Transportation system -Market access and tariff negotiation through regional and international trade agreement (WTO)	Increase competitiveness of the SMEs
Regional Cooperation	ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) (The ASEAN secretariat, 2015)	Increasing networking

Secara garis besar, maka skema kebijakan untuk melakukan internasionalisasi UKM merupakan salah satu bentuk pemberdayaan UKM sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dalam rangka untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) melalui pengembangan ekonomi kerakyatan atau dikenal dengan demokrasi ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar kebijakan politik ekonomi nasional (fundamental political economy) yang harus menjadi titik acuan yang bersifat fundamental/mendasar. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan strategis harus tetap mengacu pada kebijakan politik ekonomi

sebagaimana tertuang di dalam Pasa 33 UUD 1945. Upaya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan ini selanjutnya diadopsi oleh Pemerintah Jokowi dalam 9 Agenda Prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA, yang mana butir 6 dari agenda tersebut menegaskan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Selanjutnya, kebijakan nasional ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan strategis dalam bentuk berbagai fasilitas, insentif maupun perundang-undangan (regulasi). Arah kebijakan politik ekonomi nasional dalam kerangka internasionalisasi UMKM dapat digambarkan dengan table berikut ini:



Dari skema di atas, maka segala bentuk kebijakan strategis yang tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, paket kebijakan maupun fasilitas/insentif tidak boleh bertentangan dengan politik ekonomi nasional (fundamental political

economy) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi untuk menuju tercapainya negara kesejahteraan (welfare state). Kebijakan strategis dalam rangka untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar interansional dibangun melalui pembentukan kebijakan yang dapat membuka peluang akses internasionalisasi khususnya bagi UMKM. Akses internasionalisasi dibangun dari beberapa aspek/ elemen, diantaranya: pemahaman terhadap internasionalisasi, penguatan lembaga intermediary, penguatan pengalaman/pemahaman terhadap budaya (cultural), bahasa maupun regulasi (international regulations) di negara tujuan ekspor, kategorisasi dari perusahaan (size of companies), capacity building, strategic alliances, international awareness, tidak adanya koordinasi (fragmentation) kelembagaan, local orientation, akses terhadap pembiayaan/financial.

Keberhasilan kebijakan untuk meningkatkan internasionalisasi UMKM harus didahului dengan adanya pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan internasionalisasi. Akses interanasionalisasi haruslah dipahami secara luas, tidak hanya mengacu pada ekspor (direct exporting), tetapi juga termasuk penanaman modal asing, baik secara langsung (direct investment) atau FDI (Foreign Direct Investment) maupun tidak langsung (indirect investment) yang meliputi kerjasama dengan perusahaan asing melalui joint venture, non equity alliances, licensing (lisensi) dan waralaba (franchising). Dimensi yang kedua adalah perlunya untuk memperkuat peran dan kapabilitas lembaga intermediary untuk melakukan optimalisasi terhadap peluang ekspor, termasuk upaya untuk bisa memberikan dukungan terhadap teknologi baru, sourcing maupun networking. Di

Indonesia, peran SMESCO sebagai salah satu lembaga intermediary perlu untuk diperkuat untuk dapat lebih mengoptimalkan perannya terhadap internasionalisasi UMKM. Di Eropa Union, misalnya, European Creative Business Network (ECBN) merupakan lembaga intermediary untuk membangun network di berbagai negara yang tergabung dalam EU, termasuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan ekonomi di Eropa. Mapping juga merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap daya saing UMKM melalui analisis SWOT, selain itu juga melakukan mapping terhadap jaringan (network) di berbagai negara sebagai tujuan ekspor untuk mengoptimisasi dan mengidentifikasi pasar internasional di berbagai negara. Mapping dapat memberikan data yang diperlukan untuk membangun strategi maupun kebijakan yang tepat dan berhasil guna.

*Mapping is a tool for awareness araising; - It helps to create networks of SMEs, organizations and companies being involved in mapping studies - The process is a basis for policy formulation - If the mapping involves visual mapping, it is a source for clustering initiatives and city branding.<sup>7</sup>*

Koordinasi dan sinergi berbagai kelembagaan juga sangat berperan untuk membentuk strategi yang terintegrasi. Sinergi kelembagaan dalam proses internasionalisasi UMKM melibatkan beberapa lembaga pemerintah maupun non pemerintah di beberapa bidang/dimensi, diantaranya (1) kelembagaan dan HKI; (2) permodalan; (3) SDM; (4) infrastruktur dan teknologi; (5) pemasaran.

---

<sup>7</sup> European Creative Industries Alliance, Creative Industries Internationalisation, dapat diakses, Diakses tanggal 24 Desember 2017.

Strategis aliansi tidak hanya melibatkan instansi pemerintah seperti kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan UKM, kementerian hukum dan HAM, kementerian perindustrian, kementerian perekonomian, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, tetapi juga berbagai stakeholders, termasuk komunitas bisnis, non pemerintah, dalam rangka untuk membentuk strategi kebijakan terintegrasi dalam rangka internasionalisasi UMKM. Strategi aliansi dapat dilakukan dengan beberapa model yaitu :

1. ad hoc working group yang melibatkan beberapa stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah;
2. specific unit
3. permanent networks
4. government arms length organization (public atau semi public bodies)
5. non governmental organization
6. cross border network.<sup>8</sup>

Berbagai aliansi strategis sudah diterapkan di beberapa negara termasuk dalam upaya internasionalisasi UMKM sektor kultural dan kreatif industri seperti CCCE (Centre for Culture and Experience Economy) di Denmark yang merupakan bentuk specific agency (independent government funded agency) yang didirikan pada tahun 2008. Badan ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi dan network antara UMKM sektor kultural dan ekonomi kreatif dengan komunitas bisnis, termasuk memberikan berbagai panduan bisnis. Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia

---

<sup>8</sup> European Union, Policy Handbook, Op.cit., h. 18.

yang lebih mengandalkan pada program penyuluhan dan pelatihan yang lebih bersifat jangka pendek daripada pembentukan badan yang berorientasi jangka panjang yang berkesinambungan. Seharusnya langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, meningkatkan neraca perdagangan dan mendukung kegiatan ekspor (internasionalisasi) dipersiapkan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta) secara holistik. Peningkatan 'awareness' terhadap proses internasionalisasi UMKM ditujukan untuk meningkatkan kualitas/daya saing UMKM dan mengupayakan partnership antara UMKM dengan sektor bisnis. Di Austria, sebagai contoh, dibentuk CIS (Creative Industry Styria) yang merupakan suatu 'networking association' yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan daya saing UMKM tetapi juga untuk menjalin network/ partnership dengan sektor bisnis baik nasional maupun internasional melalui pola subkontrak (outsourse). Dalam rangka untuk meningkatkan 'awareness' dalam rangka proses internasionalisasi UMKM, maka dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya: (1) melakukan program study visit; (2) diseminasi melalui program penyuluhan dan pelatihan; (3) konferensi, seminar dan workshop; (4) web page/web based dan newsletter, yang mana program-program tersebut dilakukan secara terstruktur, terintegrasi dan berkesinambungan (sustainable) melalui suatu lembaga/ agency atau asosiasi dan tidak dilaksanakan secara fragmented.

*Similar national, regional and local programmes, initiatives and organizations can be found in many countries. There are those that deal primarily with awareness raising, but also those that provide trainings and consultancy services. For example Creative Estoni, a which is a national umbrella programme for all the CIs related awareness raising activities e.g.*

*we portal, newsletter, seminars, conferences, publications, studies, networking, match making activities PR support for creative industries.*<sup>9</sup>

Lembaga yang serupa juga dibentuk di berbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa, diantaranya Creative Wallonia (Belgium); Creative Finland; Creative England; Creative Scotland dan Creative Industries Forum (Slovakia).<sup>10</sup> Dari skema tersebut diatas, nampak bahwa Indonesia belum menerapkan kebijakan internasionalisasi UKM secara terintegrasi dan komprehensif. Keberadaan SMESCO (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) belum berfungsi secara efektif dalam rangka untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan membangun jaringan (network). Selain itu, unsur kelembagaan (organizational framework) dalam pelaksanaan setiap program pengembangan maupun internasionalisasi UMKM belum menjadi titik sentral. Berbagai program internasionalisasi hanya dilaksanakan secara insidental dan tidak berkesinambungan sehingga tidak dapat mendukung pembentukan 'international awareness'. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kesenjangan (gap) dari berbagai kebijakan tersebut, terlebih lagi kebijakan tersebut masih bersifat sektoral/ alokatif dan belum menjangkau dimensi 'internationalization awareness', network maupun 'international entrepreneurial' yang merupakan dimensi dominan dalam rangka internasionalisasi UKM. Dapat dicermati bahwa fasilitasi belum menjangkau berbagai stakeholder sehingga hanya melibatkan lembaga pemerintah.

---

<sup>9</sup> European Union, Policy Handbook, Op.cit., h. 20 .

<sup>10</sup> Ibid.

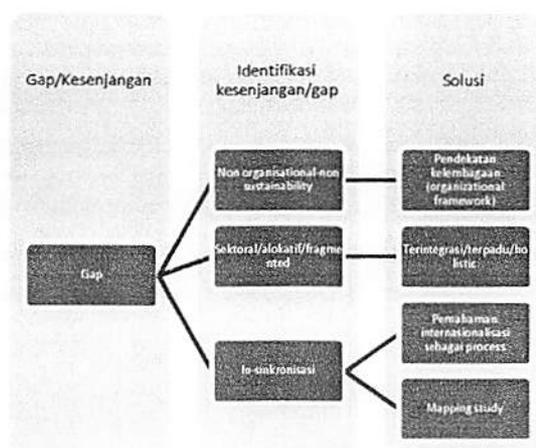
Selain itu, fasilitasi hanya bersifat alokatif dan sektoral dan tidak bersifat organisasional sehingga tidak menjamin kesinambungan (sustainability) dalam proses internasionalisasi UMKM. Belum terdapat upaya holistik/terpadu diantara beberapa lembaga pemerintah seperti BUMN, BUMD, Kadin, Kementerian koperasi, maupun pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang secara langsung mempengaruhi tingkat daya saing produk UKM di pasar global belum sepenuhnya terealisasi. Belum sepenuhnya terdapat koordinasi dan integrasi dalam pengambilan kebijakan internasionalisasi UMKM. Kebijakan yang cenderung bersifat alokatif dan sektoral mengakibatkan kegiatan internasionalisasi UMKM tidak sepenuhnya didukung kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap internasionalisasi UKM, diantaranya: kebijakan menyangkut ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan pasar global, pengaturan mengenai kegiatan ekspor, infrastruktur, SDM maupun lingkungan bisnis yang kondusif bagi proses internasionalisasi UKM. Hal ini menunjukkan keterkaitan (spill over) proses internasionalisasi UMKM dengan berbagai sector, sehingga tidak adanya pendekatan secara holistic/terintegrasi diantara berbagai instansi yang terkait akan mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan dalam pengambilan kebijakan. Perlunya integrasi dalam pengambilan kebijakan mengingat proses internasionalisasi UMKM dipengaruhi oleh berbagai sektor, tidak hanya terkait dengan unsur produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, transportasi, pemasaran, maupun permodalan. Hambatan internasionalisasi pada prinsipnya terkait dengan lemahnya pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha UMKM

tentang pasar internasional, keterbatasan pembiayaan atau finansial, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan teknologi dan inovasi, keterbatasan kualitas SDM, persaingan usaha dan kebijakan pemerintah.<sup>36</sup> Berbagai jenis hambatan tersebut diatas menunjukkan bahwa proses internasionalisasi UMKM bukan bersifat interdisipliner sehingga tidak hanya terkait dengan pengaturan mengenai ekspor semata, tetapi juga terkait dengan bidang lainnya seperti pengembangan SDM, edukasi, kultural (budaya), pemahaman regulasi, akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu perlu adanya integrasi dari berbagai sektor dengan melibatkan berbagai stakeholders baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.

## **B. ANALISA KESENJANGAN (GAP) DALAM KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UMKM**

Berpijak dari identifikasi berbagai kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fasilitas (insentif), paket kebijakan maupun regulasi dalam rangka proses internasionalisasi UKM, nampak bahwa kebijakan tersebut belum bersifat komprehensif dan terintegrasi. Masih terdapat banyak kesenjangan (gap) dalam kerangka kebijakan internasionalisasi UKM di Indonesia. Jika dicermati dari table diatas dan dikaitkan pula dengan kerangka model 'integrated policy', maka nampak bahwa pemerintah hanya menitikberatkan pada tahap 'policy/measure' dalam bentuk pemberian berbagai fasilitas maupun regulasi, namun mengabaikan tahap lainnya yaitu 'pre condition' dan kerangka organisasional (organizational framework) sebagai tahap awal sebelum dibentuknya kebijakan strategis. Akibatnya, sasaran program-program yang dirancang oleh pemerintah tersebut tidak dapat berfungsi secara

efektif karena belum sesuai dengan tingkat kesiapan UKM untuk melakukan proses internasionalisasi. Bahkan, sarana pendukung pelaksanaan program (seperti SMESCO) hanya dinikmati oleh UMKM yang telah benar-benar siap untuk go internasional dan belum menyentuh UMKM yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Hal ini juga disebabkan ketiadaan proses 'mapping' maupun penciptaan 'internationalisation awareness' bagi UMKM. Dengan kata lain, kebijakan internasionalisasi UKM belum dilakukan secara holistic (holistic approach). Meskipun upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM telah dicanangkan dalam kebijakan nasional yaitu RPJP, namun belum terintegrasi secara terpadu. Terbukti berbagai fasilitas/regulasi masih yang bersifat alokatif/sektoral seperti program pengembangan system pendukung usaha mikro, program pengembangan keterampilan pelaku usaha UKM. Namun, kebijakan yang bersifat regulatif terhadap pemberdayaan UKM seperti program penguatan kelembagaan koperasi dan program penguatan pasar dan perilaku pelaku pasar (internationalization awareness) belum memadai. Kesenjangan (gap) dalam kerangka internasionalisasi UKM dapat diidentifikasi dengan table berikut ini:



## **MODEL KEBIJAKAN NASIONAL SECARA TERPADU (*INTEGRATED POLICY*) DALAM KERANGKA INTERNASIONALISASI UMKM**

### **A. Perlunya ‘Linkage’ antara Perusahaan Multinasional dengan UMKM**

Proses internasionalisasi sebagai salah satu bagian dari strategi pertumbuhan (growth strategy) tidak akan tercapai tanpa adanya suatu networking melalui pola sub kontrak. Pola subkontrak dalam rangka internasionalisasi UMKM sudah diterapkan di beberapa negara, termasuk Jepang, Korea, Taiwan dan Malaysia serta beberapa negara Eropa.<sup>11</sup> Hal ini mengingat hambatan terbesar pengembangan UMKM adalah keterbatasan dana (financial resources) dan rendahnya kualitas produk (product quality).<sup>12</sup> Selain itu, keterbatasan kemampuan di bidang pemasaran (marketing skill) dan networking juga turut berkontribusi terhadap perkembangan UMKM. Hambatan ini juga mempengaruhi pola internasionalisasi

<sup>11</sup> A Hodgkinson, The Internationalization Process of Asian Small and Medium Firms, University of Wollongong, Department of Economics, Working Paper Series 2000, p. 15 .

<sup>12</sup> Ibid.

di beberapa negara Asean yang sebagian besar menerapkan 'stage approach' melalui pola subkontrak. Ciri utama dari model ini adalah adanya jaringan sub kontrak (subcontracting network) antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dan menengah (UMKM).<sup>13</sup> Pada prinsipnya, pola ini lebih menitikberatkan pada elemen network secara dominan. Ciri utama dari model ini adalah adanya jaringan subkontrak (sub contracting network) antara perusahaan besar dengan UMKM. Proses produksi dikelola melalui 'inter firm relationship'<sup>14</sup>, yang melibatkan sistem multi tier, dengan tetap menitikberatkan pola kemitraan dengan tetap memberikan dukungan finansial dalam bentuk pinjaman, pelatihan dan bantuan teknis. Pola subkontrak dengan sistem multi tier secara internal juga diterapkan di beberapa sentra batik di Indonesia, misalnya di Pekalongan yang dikenal dengan sistem cluster.<sup>15</sup> Namun, sistem ini hanya dilakukan secara internal sehingga perlu pengembangan secara external melalui pola 'networking subcontract' yang dapat menjangkau pasar global sebagai upaya untuk melakukan internasionalisasi UMKM.

Model kebijakan terintegrasi (integrated policy) bertujuan untuk menciptakan konsistensi antara berbagai kebijakan yang tertuang di berbagai legislasi maupun peraturan perundang-undangan (regulation) maupun delegated legislation. Tanpa adanya kebijakan secara terintegrasi, maka akan potensi terjadinya 'bias' dan

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Aulia Dwi Zulhida & Ragil Haryanto, Spesialisasi Kegiatan Produksi dan Kemitraan Subkontrak pada Kluster Batik Kota Pekalongan, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2016, 95-110.

distorsi yang akan menghambat proses internasionalisasi UMKM. Pola pengembangan UMKM melalui pola subkontrak yang diatur di dalam Undang-Undang Integrasi kebijakan ini dimulai dari tataran legislasi yaitu Undang-Undang UMKM harus didukung dengan kebijakan pememerintah di berbagai sektor, DNI (Daftar Negative Investasi), pengaturan berbagai 'investment measures' ataupun persyaratan investasi bagi investor asing yang salah satunya melalui pola joint venture maupun pola subkontrak yang memungkinkan UMKM untuk menjadi bagian dari 'network' maupun perdagangan internasional maupun regional. Selain itu, mengingat 'financial resources' juga merupakan salah satu penghambat perkembangan UMKM, maka perlu didukung dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perpajakan yang bersifat lebih memberikan 'tax incentive' bagi perusahaan besar yang bisa melibatkan UMKM dalam proses produksinya. Kebijakan investasi yang lebih bersifat terbuka (open investment policy) yang disertai dengan 'investment measures' dalam bentuk joint venture maupun pola subkontrak dan tax incentives sebagai upaya untuk memberikan peluang internasionalisasi bagi UMKM. Peran pemerintah dalam melalui pembentukan kebijakan sangat berpengaruh terhadap internasionalisasi UMKM. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi kebijakan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat pemerintahan daerah (local government) dalam bentuk berbagai peraturan daerah. Distorsi dan bias diantara kebijakan pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penghambat internasionalisasi UMKM.

*...SMEs are not themselves sufficient for growth without the appropriate development of institutions and support structures. The*

*supportive actions* may be in the form of incentives, tax breaks, subsidies, export training, or trade barriers.<sup>16</sup>

Pembentukan kebijakan pemerintah dalam rangka internasionalisasi UMKM melalui pola sub kontrak harus didukung oleh pranata hukum (legal infrastructures); dan kerangka hukum (legal framework). Faktor utama pola internasionalisasi UMKM melalui sub kontrak pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan adanya suatu 'linkage' antara perusahaan besar (MNE) dengan UMKM (SME), sehingga diharapkan adanya suatu 'spillover' know how, maupun teknologi dari prinsipal (MNE).<sup>17</sup> Oleh karena itu, kerangka kebijakan pemerintah harus diupayakan untuk memperkuat 'linkage' tersebut melalui pembentukan kebijakan ekonomi/ investasi nasional, regional, maupun internasional. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan harus memfasilitasi terbentuknya 'linkage' antara UMKM dan perusahaan multinasional. Diantaranya adalah dengan memperkuat 'business environment' dan iklim investasi yang mendukung terciptanya 'linkage' antara MNE dan UMKM. Dalam upaya untuk menciptakan adanya suatu 'linkage', maka perlu didukung dengan berbagai strategi kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi berikut ini :

---

<sup>16</sup> Fariza Hashim, Challenges for the Internationalization of SMEs and the Role of Government: The Case of Malaysia, *Journal of International Business and Economy* (2012) 13 (1): 97-122.

<sup>17</sup> OECD Investment Committee, Encouraging Linkage between Small and Medium Sized Companies and Multinational Enterprises, An Overview of Good Policy Practice, available at Accessed on 10 August 2017, p. 14.

*“(1) overcoming information barriers; (2) enabling SMEs to becoming more attractive partners and to benefit from partnership; and (3) encouraging MNEs to forge linkages with local enterprise.”<sup>18</sup>*

Kebijakan yang mendukung perluasan Network dalam perdagangan global - sebagai strategi untuk mengatasi hambatan informasi. Perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses terhadap pasar internasional untuk memudahkan proses pencarian rekan bisnis - subcontracting party (UMKM). Upaya untuk mendukung persebaran informasi juga dapat dilakukan melalui kebijakan untuk memanfaatkan ‘international initiatives’ seperti UNIDO Subcontracting and Partnership Exchanges (SPXs) yang dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan untuk mencari data terkait dengan perusahaan manufacture di seluruh dunia. Strategi melalui SPXs Network ini berfungsi sebagai lembaga intermediary yang dapat menjembatani hubungan bisnis (linkage/network) antara UMKM dengan rekan bisnis perusahaan multinasional. Lembaga intermediary seperti SPXs yang berada di bawah United Nations on Industrial, European Creative Business Network (ECBN) tidak hanya berfungsi untuk mencari peluang pasar (ekspor), tetapi juga membantu untuk memberikan ide/gagasan baru, metode, berbagai bentuk penemuan (discovery) dan import teknologi baru, maupun pencarian network dengan berbagai perusahaan.

1. Kebijakan Investasi untuk mendorong perusahaan multinasional melakukan partnership melalui pola subkontrak dengan UMKM - Performance

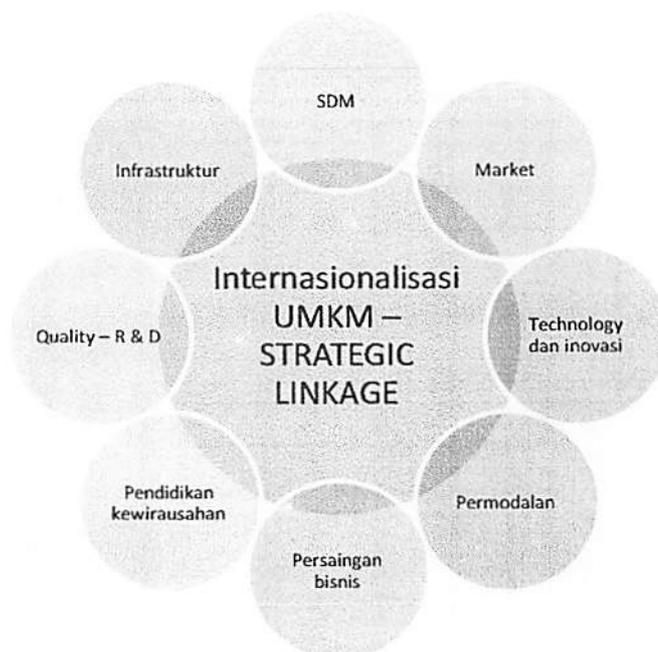
---

<sup>18</sup> Ibid.

requirements/incentive based performance requirements. Hal ini dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan investasi nasional melalui penerapan persyaratan terkait dengan local content, local equity atau join venture sebagai beberapa persyaratan untuk melakukan investasi di Indonesia. Kebijakan terkait dengan adanya 'performance requirement' akan memberikan iklim agar pihak perusahaan multinasional juga memberdayakan UMKM nasional dalam kegiatan investasinya di Indonesia. Kebijakan tentang 'performance requirements' ini bisa dituangkan di dalam berbagai perjanjian investasi baik nasional, internasional, maupun regional diantara negara-negara Asean, seperti *Bilateral Investment Treaty, Free Trade Agreement (with investment content), regional investment agreement such as ACIA (Asean Comprehensive Investment Agreement)*. Beberapa bentuk 'performance requirements' yang dituangkan dalam perjanjian investasi regional maupun internasional bisa dalam bentuk joint venture atau local equity requirement, kewajiban transfer teknologi (technology transfer) maupun local content requirement. Namun, penentuan performance requirements harus pula memperhatikan WTO Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) maupun GATT 1994 yang menegaskan bahwa beberapa 'performance requirement' juga dapat memberikan dampak negatif (restrict/distort) terhadap perdagangan. Oleh karena itu, perlu diadopsi 'incentive based performance requirements' sebagai salah satu upaya untuk mendukung terciptanya 'linkage' antara perusahaan multinasional (MNEs) dengan UMKM melalui incentives. Kebijakan investasi dalam bentuk 'incentive based', 'performance requirement' tidak bersifat memaksa dan diikuti dengan pemberian incentive jika dilakukan oleh pihak investor

(perusahaan multinasional). Kebijakan investasi ini dapat menjembatani dan mendukung terciptanya ‘linkage’ antara UMKM dengan perusahaan multinasional.

2. Elemen kebijakan pemerintah secara integral untuk mencapai internasionalisasi UMKM :



mempengaruhi proses internasionalisasi UMKM. Model kebijakan yang terintegrasi (*integrated policy model*) berupaya untuk mengintegrasikan keseluruhan elemen tersebut secara holistic/terpadu. Model konseptual yang dipaparkan rangka proses internasionalisasi UMKM yang dikenal sebagai ‘integrated policy model’ didasarkan pada tiga teori internasionalisasi yaitu Uppsala model, yang mencakup market knowledge termasuk market commitment; (2) international entrepreneurship atau international capability; dan (3)

Network/linkage – hubungan antara firms dengan subcontractor atau antara UMKM dengan perusahaan besar. Ketiga teori ini secara holistic/komprehensif mendasari model ‘integrated policy’ dalam proses internasionalisasi UMKM.

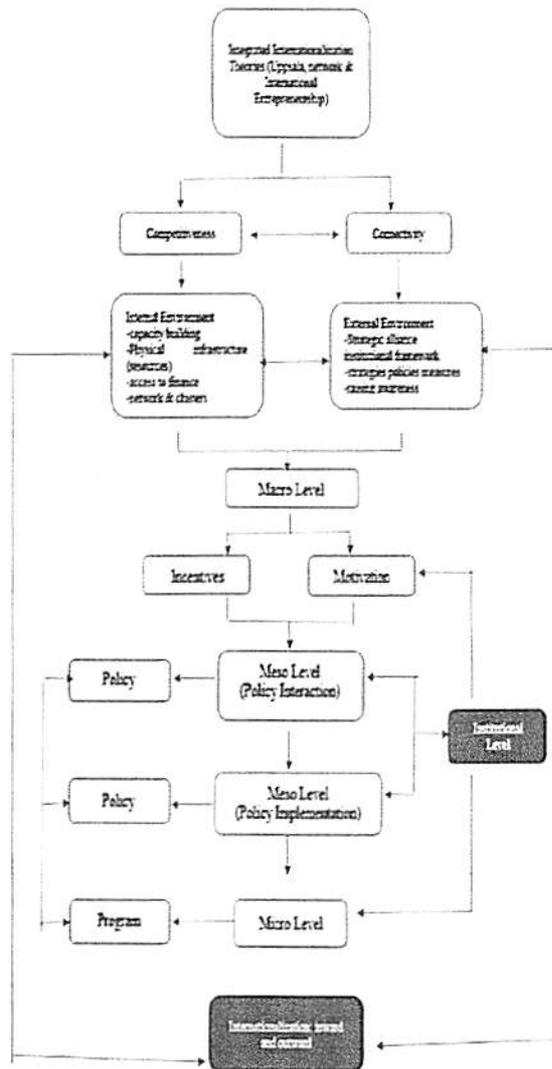


Figure 1: Systematic Integrated policy model

Ketiga teori internasionalisasi melandasi kerangka proses internasionalisasi mulai dari tahap 'pre condition' (penciptaan lingkungan yang kondusif) hingga tahap 'strengthening' (penguatan) proses internasionalisasi UMKM 'Market knowledge' memberikan pengetahuan tentang pasar terhadap pelaku UMKM termasuk informasi mengenai pasar luar negeri/internasional dan akses menuju pasar luar negeri dan pengetahuan tentang aturan perdagangan internasional aturan tertentu di negara tujuan ekspor. 'International entrepreneurial' dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kapabilitas (*capability building*) pelaku UMKM dalam bentuk kemampuan untuk menghadapi risiko (*take risk*), sikap inovatif, proaktif, maupun kemampuan untuk bersaing (*competitiveness*) di pasar internasional. Sedangkan 'Network/linkage' terkait dengan upaya untuk menciptakan jaringan produksi maupun 'professional network' melalui investasi, pola subkontrak maupun berbagai bentuk 'non equity relationship' seperti contractual joint venture, licensing, franchising. Ketiga teori tersebut mendasari proses internasionalisasi yaitu tingkat intensitas pelaku UMKM untuk dapat melakukan bisnis internasional. Namun, proses internasionalisasi pada tahap ini adalah 'stage model' atau bersifat 'incremental internationalisation' yang berlangsung secara bertahap. Namun, diharapkan proses internasionalisasi ini dalam jangka panjang akan mampu menciptakan 'born global' UMKM.

Hubungan antara 'market knowledge' termasuk 'market commitment' yaitu terhadap proses internasionalisasi didukung oleh beberapa penelitian,

diantaranya yang dipaparkan oleh Mariola Ciszewska,<sup>19</sup> Musteen & Datta<sup>20</sup>, Johanson & Vahlne<sup>21</sup> and Eriksson et.al.<sup>22</sup> Johansson, 'foreign market knowledge' didefinisikan sebagai segala bentuk pengetahuan terkait dengan praktek bisnis di pasar internasional. Pengetahuan pasar ini meliputi budaya local, situasi persaingan, kebutuhan konsumen dan kelembagaan (institusional) internasional. Sebagian besar dari para peneliti tersebut diatas menjelaskan adanya hubungan yang positif/ keterkaitan antara 'foreign market knowledge' (pengetahuan pasar) dengan proses internasionalisasi UMKM. Oleh karena itu, pengetahuan pasar internasional merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam rangka internasionalisasi UMKM. Hambatan yang paling utama di dalam proses internasionalisasi UMKM adalah minimnya pengetahuan pasar dari para pelaku UMKM.

Unsur 'international entrepreneurship' juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap internasionalisasi UMKM.

---

<sup>19</sup> Mariola Ciszewska-Mlinaric, Market Knowledge and SMEs International Performance: Moderating Effect of Strategic Intent and Time to Internationalization, *Entrepreneurial Business and Economic Review*, Vol. 4 No. 4, 2016, h. 54.

<sup>20</sup> Martina Musteer F Drepak K. Datta et. al (2014), Do International Network and Foreign Market Knowledge Facilitate SME Internationalization? Evidence From the Czech Republic, *entrepreneurship Theory and Practise*, vol. 38, Issue 4, PP 749-774, 8490104. pdf.

<sup>21</sup> Johanson Jan & Jan, Erick Vahlne (2009), the Uppsala Internationalization Process Model Revisited : From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, *Journal of International Business Studies*, Vol.40, Issues, PP. 1411-1413.

<sup>22</sup> Kent Eriksson et.al, Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization, Process (1997), *Journal of International Business Studies*, Second Quarter available at : <http://link.springer.com/content/pdf/10.1057/palgrave.jibs>

*'international entrepreneurial orientation is a fundamental corporate posture, contributing strongly to the international performance of the SMEs. It emphasizes innovation, risk taking and a generally proactive approach to business in foreign market. We frame it as a basic firm orientation because it is relatively enduring and exist at the level of managerial beliefs and values. The case studies suggested that international entrepreneurial orientation is among the most important orientation success factors in the overall performance of international SMEs and tends to drive various key strategies.'*<sup>23</sup>

Kemampuan pelaku UMKM untuk menghasilkan suatu inovasi atas produk, bersikap proaktif dalam menghadapi pasar global serta keberanian untuk menanggung risiko bisnis merupakan perwujudan kapabilitas untuk memperbesar peluang internasionalisasi. Hubungan antara 'market knowledge' termasuk 'market commitment' yaitu terhadap proses internasionalisasi didukung oleh beberapa penelitian, diantaranya yang dipaparkan oleh Mariola Ciszewska, Musteen & Datta, Johanson & Vahine and Eriksson et.al. Menurut Hubungan yang positif antara 'network' dengan proses internasionalisasi didukung oleh beberapa peneliti,

---

<sup>23</sup> Gary A Knight, Entrepreneurship and Strategy in the International SME, Journal of International Management 7 (2001) 155-171, h. 159.

diantaranya Anderson & Helander,<sup>24</sup> maupun Yee Kwan Tang<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa: *'the ability of SMEs to plan and conduct networking activities strategically with key partners is beneficial to obtain the influential resources for accelerating business development.* Pentingnya 'linkage/network' dalam proses internasionalisasi UMKM tidak hanya bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis antara UMKM dengan perusahaan besar, tetapi juga dapat memacu terjadinya transfer (*spill over*) teknologi maupun know how yang dimiliki oleh perusahaan besar terhadap UMKM.

## **B. KERANGKA PELAKSANAAN (*PERFORMANCE FRAMEWORK*) TERHADAP 'INTEGRATED POLICY MODEL'**

Setelah pada sub bahasan sebelumnya dipaparkan terkait dengan model 'integrated' secara konseptual, maka selanjutnya akan dibahas terkait dengan bagaimana kerangka pelaksanaan terhadap model tersebut. Sebagai suatu proses, kerangka pelaksanaan internasionalisasi juga dilaksanakan melalui pentahapan secara strategis. Salah satu tujuan utama dari 'integrated policy model' juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pendekatan secara fragmented (terpisah-pisah) baik pada tingkat kebijakan local, regional, maupun nasional dalam proses internasionalisasi. Proses ini didahului dengan pembentukan kondisi yang kondusif

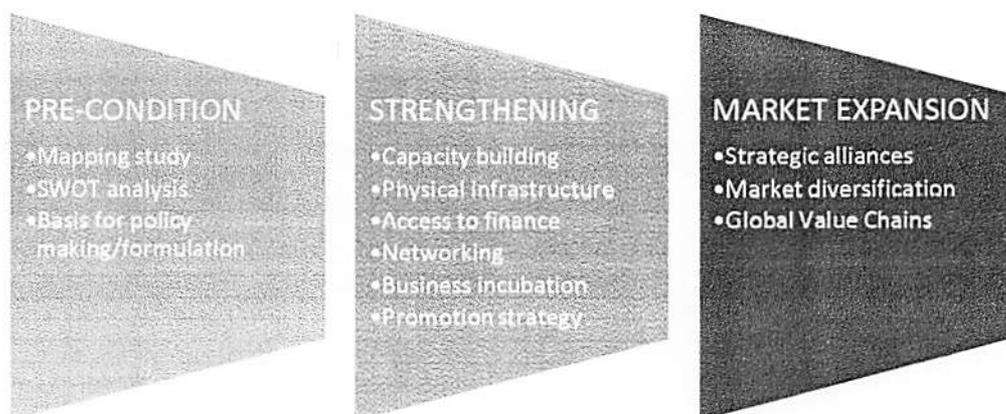
---

<sup>24</sup> Anderson, Arvid & Helander, Anna, *The Influence of Network Relationship in the Internationalization of SMEs*, master thesis, Jonkoping International Business School, 2009.

<sup>25</sup> Yee Kwan Tang, *The Influence of Networking on the Internationalization of SMEs: Evidence from Internationalized Chinese Firms*, *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 2011, h. 1.

sebagai tahap awal (*preconditiono stage*) yang dimulai dari mapping terhadap berbagai kebijakan dan berbagai stakeholders yang terkait dalam proses internasionalisasi, mapping terhadap berbagai industri UMKM termasuk sektor kultural dan ekonomi kreatif di berbagai daerah, membangun dukungan politik terhadap proses internasionalisasi tersebut melalui 'strategic alliances institutional framework' tidak hanya terhadap lembaga pemerintah, tetapi termasuk lembaga non pemerintah; pembentukan 'international awareness' diantara pembentuk kebijakan/ berbagai stakeholders, termasuk pembentukan kebijakan maupun fasilitas yang mendukung proses internasionalisasi. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa internasionalisasi merupakan suatu proses yang juga berimplikasi terhadap pelaksanaan bertahap mengingat pelaku bisnis (UMKM) pada umumnya belum mempunyai pemahaman yang maksimal mengenai pasar luar negeri dan cenderung untuk menghindari risiko kegagalan (*failure*). Pengetahuan yang tinggi atas pasar global akan memperkuat dan membangkitkan komitmen terhadap internasionalisasi. Pembentukan kebijakan/measure melalui pendekatan secara terintegrasi/komprehensif didahului dengan adanya mapping agar kebijakan yang dibentuk dapat berhasil guna (efektif). Berikut adalah skema tahap 'pre condition' dalam rangka pemberdayaan UMKM menuju proses internasionalisasi.

Figure: Tahapan internasionalisasi UMKM sebagai suatu proses



Tahapan internasionalisasi berdasarkan skema di atas dilakukan secara bertahap yang dimulai dari tahap 'pre condition' yaitu untuk menciptakan kondisi (environment) yang kondusif melalui proses mapping yang kemudian diikuti dengan strategi aliansi dengan berbagai institusional framework dan melakukan diseminasi program internasionalisasi guna menumbuhkan 'international awareness' bagi pelaku UMKM. 'Policy measures' dalam skema di atas juga membangun network dengan berbagai sektor kebijakan baik local, regional maupun nasional, termasuk kebijakan yang terintegrasi dengan inovasi, R& D (Research and Development), Cluster development, branding strategy, export and internationalization, sustainable development, regional development, education and life long learning, integration and cultural diversity, khususnya untuk UMKM sektor kultural dan ekonomi kreatif. Kebijakan yang bersifat fragmented seringkali tidak memberikan hasil yang positif sebab tidak sepenuhnya terintegrasi dengan beberapa sektor yang terkait. Strategi kebijakan di Indonesia cenderung bersifat alokatif dan tidak bersifat kelembagaan hanya didasarkan pada pelaksanaan program-program yang hanya bersifat insidental dan tidak terstruktur melalui

pembentukan *institutional framework* (kelembagaan) untuk menjamin adanya *sustainability* (keberlangsungan) Sehingga tidak terdapat penguatan kelembagaan seperti koperasi dan tidak terciptanya iklim usaha yang dapat memperkuat struktur pasar dan mengubah perilaku pelaku pasar UMKM menuju proses internasionalisasi (*international awareness raising*).

Setelah tahap 'pre condition' yang lebih berorientasi eksternal, maka tahap selanjutnya dalam proses internasionalisasi adalah tahap 'strengthening' (penguatan) yang meliputi *capacity building*, *physical infra structure*, *business incubation*, *access to finance* dan *network and clusters*. Tahap 'strengthening' ini lebih terkait dengan penguatan *industry* UMKM itu sendiri (*capability*). Setelah terciptanya lingkungan yang kondusif yang telah diupayakan pada tahap 'pre condition', Jika dicermati, penciptaan lingkungan pendukung proses internasionalisasi di Indonesia masih belum memadai dan lebih bersifat insidental dan tidak berorientasi pada kelembagaan (*institusional*) Pada tahap 'strengthening', nampak bahwa kebijakan pemerintah lebih bersifat alokatif dan sektoral. Kebijakan pemerintah cenderung hanya memiliki dampak peningkatan kinerja dan kapasitas UKM melalui perbaikan birokrasi pemerintah, namun belum bersifat *regulative* untuk mendorong peningkatan pangsa pasar UKM dan merubah perilaku pasar untuk mempersiapkan diri menuju proses internasionalisasi.

Proses 'strengthening' dilakukan secara kelembagaan (*institutional framework*) dan lebih bersifat *regulatif*. Kondisi ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, yang mana sebagian besar dukungan pemerintah hanya bersifat memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung proses internasionalisasi. Namun, fasilitas

kegiatan tersebut cenderung bersifat alokatif dan tidak bersifat kelembagaan (*organizational/institutional framework*) yang terstruktur dan berkesinambungan. Pada tahap 'networking', perlu dibentuk kelembagaan yang secara aktif melakukan 'match making' melalui jaringan produksi antara UMKM dengan perusahaan besar melalui pola subkontrak/joint venture. Dalam kerangka ini, perlu dibentuk kelembagaan yang berfungsi sebagai *Investment Promotion Agency* (IPA) seperti keanggotaan dalam kelembagaan SPXs (*Subcontracting and Partnership Exchange*) Centres yang ditujukan untuk menjajaki network atau jaringan produksi untuk menghubungkan antara UMKM dengan perusahaan besar melalui metode outsourcing (pola sub kontrak). Hampir lebih dari 30 SPXs telah diadopsi oleh berbagai negara di Afrika, Asia, Eropa, Latin Amerika, maupun Timur tengah. SPXs didirikan baik oleh organisasi publik maupun privat yang bertujuan untuk mendukung proses 'matchmaking' atau menciptakan 'network' dalam rangka partnership atau 'linkage' antara UMKM dengan perusahaan. Dalam rangka untuk mendukung fungsinya dalam mendukung proses internasionalisasi UMKM, SPXs mengadakan program dalam bentuk 'subcontracting fair' yang bertujuan untuk menciptakan 'linkage' antara UMKM dengan perusahaan.

*Each SPX aims at extending the local supplier base of major buyers including large foreign multinationals and state owned enterprises, by capturing their procurement needs and local content plans, benchmark the capabilities of domestic suppliers in relation to these needs and assess enterprise upgrading and investment requirements. SPX is a service provider to identify potential local suppliers and develop local supply chains and to identify their development needs and assist them in realizing their development plans.*<sup>26</sup>

“Integrated policy model’ dapat mengatasi berbagai hambatan pengembangan UMKM dalam proses internasionalisasi, yaitu : (1) dapat meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional; (2) meningkatkan kapabilitas UMKM (*entrepreneurial capability*); (3) dapat meningkatkan kemampuan UMKM untuk menghasilkan produk yang kompetitif; (4) meningkatkan penjualan produk UMKM; (5) memberikan akses pembiayaan dan jaminan kredit bagi UMKM; (6) meningkatkan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM.<sup>56</sup> Hal ini tercermin dari penerapan kebijakan secara terintegrasi/komprehensif mulai dari tahap ‘precondition’ hingga tahap ‘strengthening.’

Sebagai bagian dari tahapan ‘strengthening’ yaitu network dan clusters, maka perlu upaya untuk menciptakan ‘linkage’ antara perusahaan dengan UMKM. Salah satu upaya untuk menciptakan ‘network/linkage’ ini dilakukan dengan melalui proses subcontracting atau yang dikenal dengan model jaringan produksi (*network production model*). Partisipasi UMKM dalam bentuk ‘clustering’ maupun

---

<sup>26</sup> United Nations Industrial Development Organization, Subcontracting and Partnership Exchange (SPXs) Centres, dapat diakses di [SPX\\_factsheet.pdf](#), diakses tanggal 15 November 2017.

'networking' dapat memberikan fasilitas akses untuk transfer pengetahuan dan know how terhadap UMKM. Dalam pola jaringan produksi/subcontracting, UMKM biasanya berada dalam rangkaian tingkatan (tier) yang lebih rendah sehingga eksistensinya harus didukung dengan berbagai kebijakan dan peningkatan kapabilitasnya (entrepreneurial capability). Mengingat UMKM mempunyai kendala yang sangat umum yaitu terkait dengan kurangnya akses pembiayaan/finansial, kurangnya SDM yang berkualitas, infrastruktur, kerangka aturan dan kebijakan dan persaingan bisnis. Berbagai bentuk perjanjian kerjasama investasi baik dalam kerangka FTA (Free Trade Agreement) maupun BIT (Bilateral Investment Agreement) di Asia Tenggara menunjukkan berkembangnya kebijakan yang lebih berorientasi pada integrasi ekonomi (institutionalized economic integration) Namun, integrasi dan liberalisasi ekonomi di kawasan Asean akan dapat menggilas UMKM jika tidak terdapat didukung dengan penciptaan lingkungan yang kondusif maupun peningkatan 'entrepreneurial capability' UMKM.

## **BAB 6 PERKEMBANGAN GVCs (*GLOBAL VALUE CHAINS*) DALAM KERANGKA MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)**

### **1. Upaya Mendukung Partisipasi UMKM dalam Jaringan Produksi (*Global Value Chains/GVCs*) dalam Kerangka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)**

Sebagai bagian dari tahapan ‘strengthening’ yaitu *network* dan *clusters*, maka perlu upaya untuk menciptakan ‘*linkage*’ antara perusahaan dengan UMKM. Salah satu upaya untuk menciptakan ‘*network/linkage*’ ini dilakukan dengan melalui proses *subcontracting* atau yang dikenal dengan model jaringan produksi (*network production model*). Partisipasi UMKM dalam bentuk ‘*clustering*’ maupun ‘*networking*’ dapat memberikan fasilitas akses untuk transfer pengetahuan dan know how terhadap UMKM. Dalam pola jaringan produksi/*subcontracting*, UMKM biasanya berada dalam rangkaian tingkatan (*tier*) yang lebih rendah sehingga eksistensinya harus didukung dengan berbagai kebijakan dan peningkatan kapabilitasnya (*entrepreneurial capability*). Mengingat UMKM mempunyai kendala sangat umum yaitu terkait dengan kurangnya akses pembiayaan/finansial, kurangnya SDM yang berkualitas, infrastruktur, kerangka aturan dan kebijakan dan persaingan bisnis. Berbagai bentuk perjanjian kerjasama investasi baik dalam kerangka FTA (*Free Trade Agreement*) maupun BIT (*Bilateral Investment Agreement*) di Asia Tenggara menunjukkan berkembangnya kebijakan yang lebih berorientasi pada integrasi ekonomi (*institutionalized economic integration*)<sup>57</sup>

Namun, integrasi dan liberalisasi ekonomi di kawasan Asean akan dapat menggilas UMKM jika tidak terdapat didukung dengan penciptaan lingkungan yang kondusif maupun peningkatan 'enterpreneurial capability' UMKM.

Skema tersebut diatas menggambarkan empat level (*tier*) keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi (*production network*) dengan perusahaan besar (*original manufacturer*) melalui pola subcontracting dalam rangka untuk menciptakan 'linkage/network' antara perusahaan besar dengan UMKM. Warna biru muda menunjukkan keterlibatan UMKM pada level pertama (*first tier*), yaitu secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan (*manufacturer*). Warna hijau menunjukkan keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi dengan perusahaan besar melalui pola subkontrak pada level kedua (*two tier*). Sedangkan warna biru tua dan orange menunjukkan keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi dengan perusahaan besar melalui pola subkontrak pada level ketiga (*three tier*) dan level keempat (*four tier*) yang mana pada level ini kedudukan UMKM sangat lemah. Oleh karena itu, pelaksanaan sub contracting tidak lepas dari kerangka pembentukan 'integrated policy model' mengingat program subkontrak ini termasuk salah satu rangkaian dari program pada tahap 'strengthening' yaitu penciptaan network/cluster. Karena merupakan salah satu rangkaian dari tahap 'strengthening' , maka berhasilnya pola sub kontrak ini juga dipengaruhi oleh pembentukan kualitas UMKM (*entrepreneurial capability*). Terutama jika keterlibatan UMKM dalam pola sub kontrak berada pada level yang paling rendah (*four tier*/ditunjukkan dari warna orange dari skema), maka posisi ini sangat rentan untuk keluar dari sistem jika ternyata UMKM tidak mempunyai standard kualitas

yang ditentukan atau tidak mempunyai ‘entrepreneurial capability’. Oleh karena itu, partisipasi UMKM dalam jaringan produksi harus diikuti dengan peningkatan skills dan resources maupun penciptaan lingkungan yang kondusif bagi upaya untuk melibatkan UMKM dalam proses produksi perusahaan besar. Berikut akan digambarkan skema kerangka bagi berhasilnya pembentukan jaringan produksi antara UMKM dengan perusahaan besar:

Dalam skema diatas, terciptanya ‘linkage/network’ antara perusahaan besar dengan UMKM melalui pola subkontrak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal (capability) maupun faktor eksternal yang terkait dengan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan UMKM menuju internasionalisasi melalui berbagai bentuk kebijakan, regulasi maupun fasilitas. Kedua faktor ini dapat dicapai melalui model konseptual yaitu ‘integrated policy model’ yang mana mencakup tahap ‘pre condition’ maupun tahap ‘strengthening’ untuk mencapai hasil akhir yaitu melibatkan UMKM dalam jaringan produksi (production network) dengan melalui pola sub kontrak dengan perusahaan besar dalam tataran level yang tertinggi yaitu level 1 ataupun level 2 sehingga dapat menjamin stabilitas keterlibatan UMKM secara berkesinambungan.

Pola ini dalam kerangka MEA, telah didukung dengan berbagai perjanjian investasi, salah satunya melalui ACIA (Asian Comprehensive Investment Agreement) yang di dalamnya berisi kewajiban MNE (Multinational Enterprises) untuk melibatkan UMKM dalam proses produksi. Hal ini dapat dilihat dalam pencantuman beberapa klausula seperti ketentuan terkait dengan 'performance requirements' dalam bentuk 'local content requirements', joint venture dengan UMKM, subkontrak, dsb. Melalui kebijakan ini, dapat diciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan UMKM menuju internasionalisasi

Internasionalisasi UMKM bukan hanya dapat diukur melalui nilai ekspor semata, tetapi juga ditentukan oleh tingkat keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi global (Global Value Chains). Partisipasi UMKM dalam GVCs akan meningkatkan kontribusi dan keterlibatan suatu negara dalam pasar global. (OECD 2009). Tolok ukur yang terpenting dalam mengukur kontribusi negara terhadap GVCs harus dibedakan antara 'backward' dan 'forward' participation (OECD 2009). Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya peran serta UMKM dalam GVCs tidak hanya dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan nasional (GDP) tetapi juga dalam upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Terdapat keterkaitan antara tingkat partisipasi UMKM di dalam GVCs dengan tingkat daya saing (competitiveness), produktivitas dan pertumbuhan perkapita (per capita growth) UMKM di pasar global. (Baldwin and Yan, 2014). Tidak hanya GVCs berimplikasi secara ekonomi, tetapi juga dalam konteks makro ekonomi yaitu adanya peningkatan hubungan ekonomi antar negara secara global. Namun, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dicermati dalam peningkatan

peran UMKM dalam jaringan produksi secara global (GVCs). Keterlibatan UMKM dalam GVCs harus dicermati beberapa hal, diantaranya: (1) harus dicermati apakah keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi global (GVCs) dalam konteks 'forward participation' ataukah 'backward participation.' Sebagaimana tertuang di dalam table, partisipasi UMKM dalam GVCs dapat dibedakan menjadi 2 yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda (OECD, 2018):

Tabel

No	Type	Characteristic
1	Backward GVCs participation -	<p><i>-Individual economies participation in GVCs by importing foreign inputs to produce the goods and services they export.</i></p> <p><i>- Foreign value-added content of export</i></p> <p><i>- Upstream link – measuring foreign inputs/value added included in a state's exports by looking back along the value chain.</i></p>
2	Forward GVCs participation	<p><i>Individual economies participation in GVCs by exporting domestically product by exporting domestically produced inputs to partner in charge of downstream production stages.</i></p> <p><i>- Domestic value added sent to third economies</i></p> <p><i>- Downstream link – measuring the domestic inputs/value added of the state contained in the export of other countries by forward along the value chain</i></p>

Berdasarkan perbedaan jenis partisipasi UMKM dalam jaringan produksi secara global (GVCs) di table di atas, maka harus dibedakan antara 'domestic value-added' dari export dengan gross export. Domestic valued added export dapat diukur dengan mengurangkan antara foreign value -added yang dihasilkan melalui proses import dari negara lain yang kemudian diexport. Keterlibatan efektif UMKM dalam proses GVCs harus dilihat dari segi 'forward participation' sebab kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi UMKM dalam mendukung proses ekspor atas suatu produk.

*The ability to participate in GVCs does not necessarily benefiting from GVCs since it depends on how much domestic value added a state create in GVCs (OECD, 2009). Banga (2013) claimed that forward linkage/participation in GVCs is dominated by developed countries such as US, Japan and UK whereas developing states such as India, Vietnam, Thailand, Malaysia and Philippines only have less than one ratio of forward to backward linkages in GVCs. Indonesia has even smaller ratio of forward to backward linkages in GVCs. The first type of participation dominated SMEs in Indonesia, indicating the low level of competitiveness. The backward contribution in the production network of GVCs may not give positive implications on SMEs and national economy if it does not create domestic value added (Banga, 2013). Therefore, it is influential to link into GVCs in certain Large Entities where the state can create domestic valued added gains.*

Partisipasi UMKM dalam GVCs masih sangat rendah dibandingkan negara-negara Asean lainnya. Bahkan kontribusi UMKM di jaring produksi global di bidang metal dan machinery di tahun 2009 kurang dari 10% dibandingkan dengan nilai tambah untuk produk-produk seperti makanan, tekstil, kerajinan, dan jasa. Di Indonesia, tingginya 'forward participation' dan ekspor oleh UMKM dalam kerangka GVCs masih dipengaruhi oleh ekspor industri pertambangan. Selain itu, perlu dicermati pula apakah keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi global berada pada level yang sangat rendah (lower tier). Jika partisipasi UMKM dalam GVCs masih dalam

level yang terendah (third or lower tier), maka hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat daya saing (competitiveness) UMKM di pasar global.

*SMES clusters in Indonesia is still at an infant stage or survival cluster which mostly consist of micro enterprises with low productivity, wage, and resources - lead to low level of competitiveness of Indonesian SMEs in GVCs. (Tambunan, 2013)*

Oleh karena itu, tantangan UMKM Indonesia tidak hanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global (GVCs) semata tetapi harus dicermati terkait dengan 2 (dua) hal yaitu: (1) apakah keterlibatan UMKM dalam GVCs dalam konteks 'forward participation' yang berperan aktif dalam mempertinggi nilai tambah ekspor; dan (2) apakah keterlibatan UMKM dalam GVCs dalam level yang terendah (lower tier) ataukah level yang tertinggi (first tier) yang menunjukkan tingginya daya saing UMKM di pasar global.



## BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dalam rangka pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015, daya saing UMKM Indonesia masih menduduki posisi yang rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina dan Vietnam. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun kebijakan tersebut belum dilakukan secara terintegrasi dan masih cenderung bersifat alokatif dan sektoral. Fasilitas dan dukungan pemerintah dalam rangka proses internasionalisasi belum dilakukan secara kelembagaan (*institutional framework*) sehingga tidak terstruktur, terorganisir dan sustainable. Proses internasionalisasi UMKM di Indonesia masih mengalami banyak hambatan, diantaranya karena kerangka kebijakan pemerintah dalam proses internasionalisasi UMKM belum komprehensif. Lembaga yang terlibat tidak terikat satu sama lain dan tidak terkoordinasi.

Untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) UMKM dalam rangka internasionalisasi, maka penelitian ini memaparkan model konseptual dalam bentuk 'integrated policy model' dengan mendasarkan ketiga teori internasionalisasi secara terintegrasi yang meliputi Uppsala model, international entrepreneurship dan network. Model konseptual ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas dari UMKM tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan UMKM menuju dunia internasional. Pengembangan 'network'/linkage melalui penciptaan jaringan produksi dapat meningkatkan hubungan antara UMKM dengan perusahaan besar melalui pola sub kontrak yang

pada akhirnya dapat memberikan transfer (*spill over*) teknologi dan know how bagi UMKM.

“Integrated Policy Model” dalam penelitian ini ditujukan untuk mendukung proses internasionalisasi UMKM secara komprehensif yang dimulai pada tahap ‘pre condition’ yaitu bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi internasionalisasi UMKM hingga tahapan ‘strengthening’ yaitu bagaimana untuk meningkatkan ‘entrepreneur capability’ termasuk dengan memberikan akses finansial untuk mempercepat proses internasionalisasi.

## B. SARAN

Pembentukan kebijakan, fasilitas maupun regulasi dalam rangka internasionalisasi UMKM harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders, tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga pihak pelaku bisnis (swasta) untuk dapat mewujudkan ‘*international awareness*’ dan ‘*international market commitment*,’ Proses pembentukan kebijakan hendaknya diawali dengan proses mapping dan aliansi kelembagaan agar berhasil guna dan efektif. Data dan informasi UMKM yang tidak memadai yang disebabkan oleh tidak adanya mapping menyebabkan kurangnya transparansi bagi perusahaan, dan memerlukan upaya besar untuk memperoleh informasi berkualitas yang diperlukan perusahaan. Segala bentuk fasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing UMKM menuju pasar internasional harus dilaksanakan secara terstruktur, terorganisir dan berkesinambungan (*sustainable*) dan tidak hanya dilaksanakan secara alokatif/sektoral. Pendekatan kelembagaan dalam setiap pelaksanaan program

maupun fasilitasi terhadap akan lebih mendukung tercapainya '*international awareness*' (kesadaran untuk go internasional). Akibatnya, kurangnya intensitas '*match making*' antara UMKM dengan perusahaan untuk mendukung adopsi teknologi baru dan know how bagi akselerasi program internasionalisasi. Oleh karena itu, pengoptimalan lembaga seperti SMESCO sebagai bentuk kerjasama regional di kawasan negara-negara Asean dalam mempersiapkan berbagai lokakarya, seminar dan program penyuluhan yang bermanfaat bagi UKM untuk mempelajari metode dan strategi yang perlu diterapkan dalam memperkuat daya saing dan memanfaatkan peluang di pasar internasional. Selain itu, fungsi SMESCO tidak hanya dalam ranah '*entrepreneurial capability*' tetapi dapat lebih ditingkatkan menjadi lembaga yang berfungsi sebagai Investment Provider Agency (IPA) yang dapat menciptakan linkage/network antara UMKM dengan perusahaan dan mencari peluang investasi ataupun jaringan produksi dengan perusahaan secara global. Selain itu, program kerjasama secara regional yang bersifat kelembagaan lainnya adalah dalam bentuk working group yaitu ASEAN *Small and Medium Enterprise Agencies Working Group* (SMEWG) juga perlu dioptimalkan untuk melakukan proses pemberdayaan UMKM secara terstruktur, terorganisir dan berkesinambungan.

Pembentukan kebijakan secara terkoordinasi/terintegrasi akan mendukung pembentukan kebijakan strategis/measures yang tepat. Program internasionalisasi UMKM harus dipahami sebagai suatu proses dan merupakan suatu konsep yang bersifat interdisipliner, sehingga perlu adanya koordinasi antara berbagai stakeholders, tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga non pemerintah maupun

**pelaku bisnis. Melalui pembentukan kebijakan secara terintegrasi, maka akan dapat tercapai akselerasi dalam proses internasionalisasi UMKM.**

## DAFTAR PUSTAKA

Nik Ab Halim, Nik Abdullah dan Shahrul Nizam Mohd Zain, 'The Internationalization Theory and Malaysian Small Medium Enterprises (SMEs)', *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2011.

Johansson & Wiedersheim, 1975, dikutip dari Mohibul Islam Masum & Alejandre Fernandez, master thesis, p. 11. McDougall & Oviatt (2000), 'International Entrepreneurship: The Intersection of two Research Paths', *Academy of Management Journal*, Vol. 43, h. 902-908.

Mitgwe, 2000, 'Theoretical Milestones I International Business: the Journey to International Entrepreneurship Theory', *Journal of International Entrepreneurship*, Vol. 4.

Johanson & Mattsson, 1988, 'Internationalization in Industrial Systems: A network approach;', dalam Hood, N, Vahlne (eds) *Strategies in Global Competition*, Croom Helm, London.

Stevenson & Jarillo (1990), 'A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Mangement', *Strategies Management Journal*, Vol. 11, Summer Special Issue.

McDougall & Aviatt (1994), 'Toward a Theory of International New Ventures', *Journal of International Business Studies*, Vol. 25, No. 1.

Caviello & Munro, 1992, 'Internationalizing the Entrepreneurial Technology Intensive Firm: Growth Through Linkage Development', dalam Mohibul Islam Masum & Alejandra Fernandez, master thesis, School of Sustainable Development, 2008.

Herlina, Yoka Roida, 'Internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah', dapat diakses di <http://iddocz.com/doc/22721/internasionalisasi-usaha-mikro--kecil--dan-menengah--umkm...>, h. 7, diakses tanggal 15 April 2015.

Bernadine Zhan Yuhua, 'SME Internationalization and Measurement', Apec Policy Support Unit, Policy Brief No 12, March 2015.

Nana Osei Bonsu, 'Re-Conceptualizing Internationalization of SMEs as an Entrepreneurial Process', *International Business Management* 10 (1): 38-50, 2016.

Indra Cahyadi (2015) 'Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,' *Kajian*, vol. 20, No. 2.

European Union, European Agenda for Culture Work Plan for Culture 2011-2014, How can cultural and creative Industries contribute to economic transformation through smart specialization?

Policy Handbook on How to strategically use the EU support programmes, including structural funds to foster the potential culture for local, regional and national development and the spill over effects on the wider economy?, working group of EU member states expert on cultural and creative industries, April 2012. European Union, Policy Handbook,

Aulia Dwi Zulhida & Ragil Haryanto, Spesialisasi Kegiatan Produksi dan Kemitraan Subkontrak pada Klaster Batik Kota Pekalongan', *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 95-110.

Fariza Hashim, 'Challenges for the Internationalization of SMEs and the Role of Government: The Case of Malaysia', *Journal of International Business and Economy* (2012) 13 (1): 97-122.

OECD Investment Committee, Encouraging Linkage between Small and Medium Sized Companies and Multinational Enterprises, An Overview of Good Policy Practice, available at Accessed on 10 August 2017.

Mariola Ciszewska-Mlinaric, 'Market Knowledge and SMEs International Performance: Moderating Effect of Strategic Intent and Time to Internationalization', *Entrepreneurial Business and Economic Review*, Vol. 4 No. 4, 2016.

Gary A Knight, 'Entrepreneurship and Strategy in the International SME', *Journal of International Management* 7 (2001) 155-171.

Anderson, Arvid & Helander, Anna, The Influence of Network Relationship in the Internationalization of SMEs, master thesis, Jonkoping International Business School, 2009.

Yee Kwan Tang, 'The Influence of Networking on the Internationalization of SMEs: Evidence from Internationalized Chinese Firms', *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 2011.

OECD, Encouraging Linkages between Small and Medium Sized Company and Multinational Entities, available online, diakses tanggal 15 Oktober 2017.

United Nations Industrial Development Organization, Subcontracting and Partnership Exchange (SPXs) Centres, dapat diakses di [SPX\\_factsheet.pdf](#), diakses tanggal 15 November 2017.

Ynilla Nurhalim, *Reforming Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia: Proposal of a New Legal Entity*, master thesis, Tilburg University, The Netherlands, 2014.

Vo Tri Thanh, et.al, 'Integrating Small and Medium Enterprises (SMEs) into the More Integrated East Asia', diakses tanggal 18 Nopember 2017.

Charles Harvie, *SMEs and Production Networks - Framework*, Centre for Small Business and Regional Research, School of Economic, Faculty of Commerce, University of Wolongong.

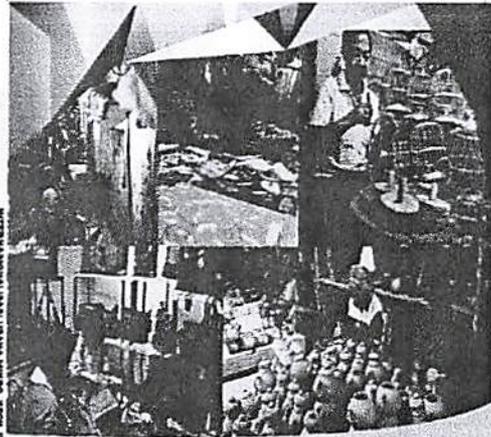
Peraturan Presiden No 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

LAMPIRAN

Buku Ajar

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

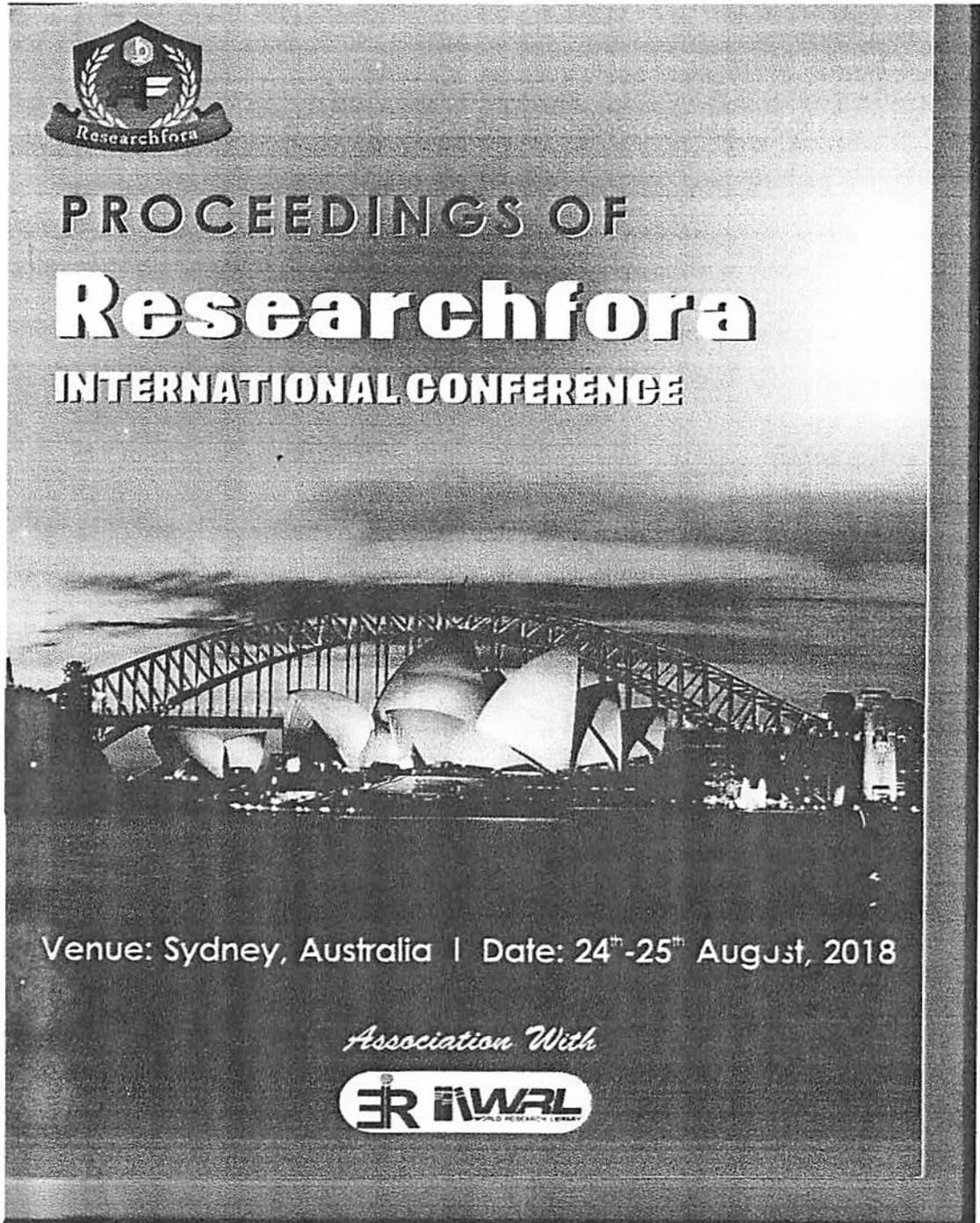


**INTERNASIONALISASI  
USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DALAM  
ERA MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN (MEA)**

Fifi Junita, S.H., M.H., LL.M. PhD  
Yunat, S.H., LL.M.



International Conference Proceeding



International conference certificate

Paper ID: RF-ICMESSYD-24088-2850



RESEARCHFORA

International Conference on  
Management, Economics & Social Science

# Certificate

*This is to certify that Fifi Junita has presented a paper entitled "Promoting the Internationalization of Small and Medium Enterprises (SMEs): Towards A Systematic Integrated Policy Model" at the International Conference on Management, Economics & Social Science (ICMESS) held in Sydney, Australia on 24<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> August, 2018.*



  
Chairman  
Researchfora



**RESEARCHFORA**

## Certificate of Session Chair

*This is to Certify that*

*Fifi Junita*

*University of Airlangga, Indonesia.*

*Joined the Researchfora International Conference*

*held in Sydney, Australia on 24<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> August 2018.*

*as a Technical Session Chair and Invited Speaker.*

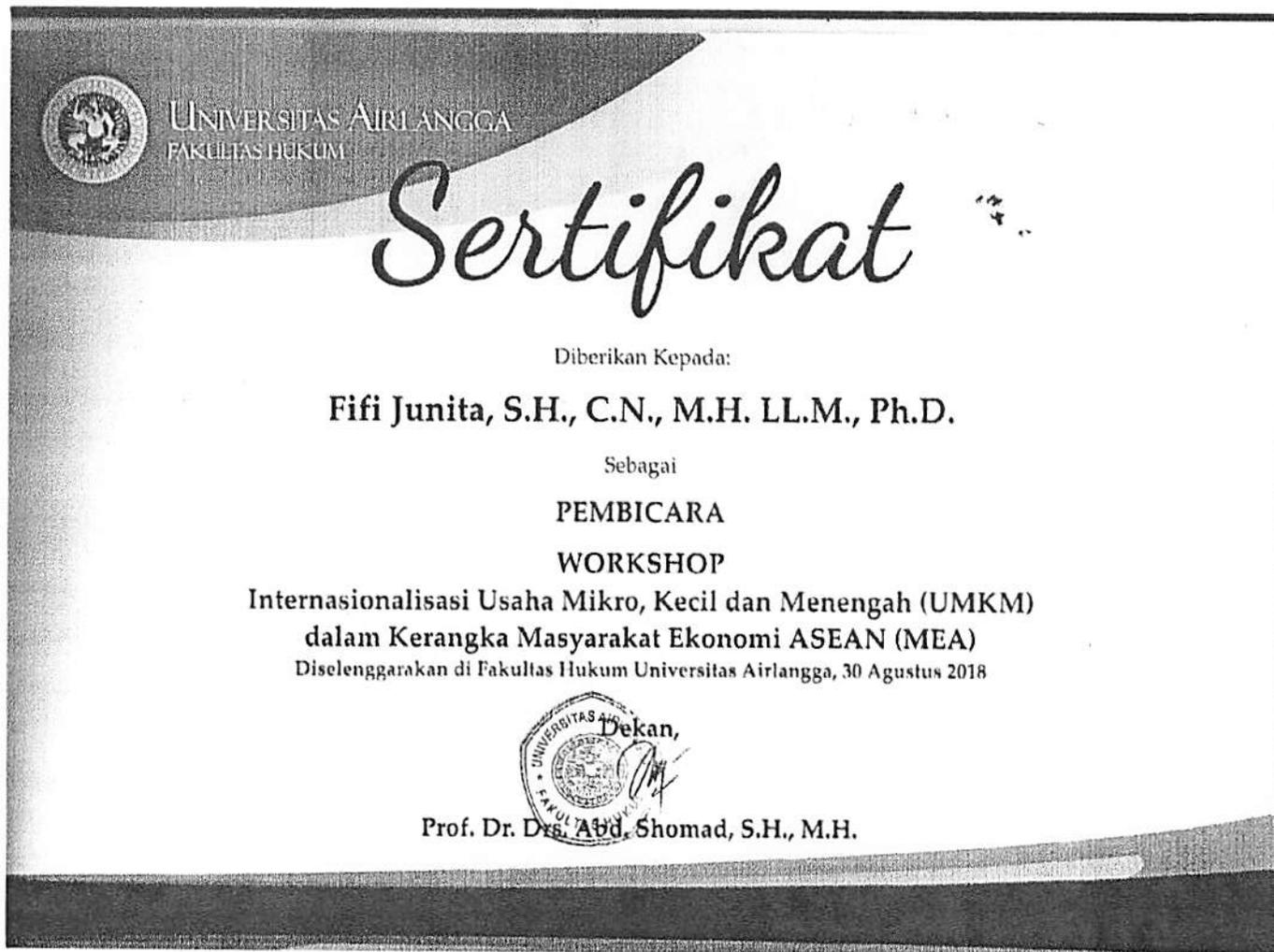
*Best wishes from Researchfora.*



  
- Authorised By  
**CHAIRMAN / DIRECTOR**



[www.researchfora.com](http://www.researchfora.com)



Workshop certificate on SMEs internationalization

International conference certificate



**International  
Law Conference  
2018 (I-NLAC2018)**

**CERTIFICATE OF  
APPRECIATION**

This certificate is proudly awarded to

**ASSOC PROF FIFI JUNITA**

as a **PRESENTER** in  
INTERNATIONAL LAW CONFERENCE 2018 (i-NLAC2018)  
on 4 - 5 September 2018  
at Asian International Arbitration Centre (AIAC), Kuala Lumpur, Malaysia



Prof. Datu' Dr. Rahmat Mohamad  
Dean, Faculty of Law  
Universiti Teknologi MARA

Host



FACULTY OF LAW  
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA  
*Creating hope, Ignite Knowledge*

Co-Hosts



AIAC  
ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE



WESTERN SYDNEY  
UNIVERSITY



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN



## INTERNASIONALISASI USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) MELALUT POLA SUBKONTRAK DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)



### Peneliti

#### FIFI JUNITA

Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga  
Fifijunita26@gmail.com

#### INTAN INNAYATUN SOEPARNA

Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga  
Intan.soeparna@fh.unair.co.id

#### YUNIARTI

Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga  
yuniarti@gmail.com



### Ringkasan Eksekutif

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Small and Medium Enterprises/SMEs) di Indonesia hingga saat ini belum mencapai taraf internasionalisasi secara maksimal. Kondisi ini tentu saja tidak sejalan dengan semakin pesatnya globalisasi maupun regionalisasi ekonomi di kawasan ASEAN. Munculnya ide pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada prinsipnya memberikan peluang (opportunities) maupun tantangan (challenges) bagi pengusaha kecil maupun menengah (SME). Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi dan sistematis (*systematic integrated policy model*). Penelitian ini berupaya untuk memberikan suatu bentuk model kebijakan baik di tingkat nasional, regional maupun secara terintegrasi dan bentuk/model hubungan kontraktual dalam upaya internasionalisasi industri kecil dan menengah untuk menghadapi peluang pasar bebas di ASEAN. Untuk mewujudkan kebijakan secara sistematis, maka internasionalisasi harus dipahami sebagai suatu proses yang dimulai dengan pre-condition environment dan diikuti dengan 'strengthening stage' (penguatan inovasi dan daya saing UMKM). Munculnya Global Value Chain (GVCs) telah memperluas peluang UMKM untuk berperan di dalam international production network melalui proses outsourcing. Namun, peluang ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung dengan kebijakan dan policy measures yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan model 'systematic integrated policy model' sebagai salah satu upaya untuk memperluas internasionalisasi UMKM di era pasar global dan AEC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan teoritis maupun praktis (theoretical and empirical approaches). Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) model kebijakan pemerintah dalam upaya internasionalisasi UMKM dalam kerangka AEC (Asean Economic Community).

Kata kunci: internasionalisasi, industri kecil dan menengah (SMEs), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)



## HKI dan Publikasi

1. Fifi Junita, Yuniarti, Buku ajar, Internasionalisasi UMKM dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Revka Petra Media, 2018.
2. International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB), The Internationalization of Small and Medium Enterprise: From Fragmented to A Systematic Integrated Model (submitted)



## Latar Belakang

Pentingnya internasionalisasi UMKM telah dikaji dan diteliti oleh beberapa penelitian. Internasionalisasi UMKM merupakan faktor yang sangat krusial untuk meningkatkan potensinya dalam peningkatan ekonomi nasional. Namun, penelitian terkait dengan internasionalisasi UMKM di sektor kultural dan kreatif ekonomi belum mendapat perhatian yang memadai. *Previous research demonstrated that internationalization is a crucial strategic alliance for developing SMEs in global era.* (Masum & Fernandez, 2008) Elemen yang terpenting di dalam proses internasionalisasi adalah bagaimana untuk menciptakan 'linkage' melalui kerangka kebijakan strategis (strategic policy framework) yang dapat mengatasi berbagai hambatan terkait dengan 'information barriers, enabling SMEs to becoming more attractive partners and to benefit from partnership and encouraging MNEs to forge linkage with local enterprise' (Hodgkinson, 2000) *In order to internationalize the cultural and creative industries, government policy has a huge influence, in order to develop precondition and create strategic policy and institutional framework that support and strengthen SMEs in CCIs.* (European Union, 2012) Internasionalisasi UMKM juga bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menciptakan suatu 'strategic measure' yang dapat menciptakan 'favorable and conducive environment' untuk mengembangkan UMKM di sektor kultural dan kreatif ekonomi melalui penciptaan network antara UMKM dan perusahaan besar melalui partnership atau kerja sama/joint venture.



## Hasil dan Manfaat

- a. Hasil penelitian dalam bentuk model 'systematic integrated policy' dalam kerangka internasionalisasi UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan UMKM dapat berkontribusi secara aktif dalam jaring produksi (production network) di era GVCs untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan GDP nasional.
- b. Memberikan pemahaman internasionalisasi sebagai suatu proses yang dimulai dari pre condition environment melalui analisa SWOT untuk mengetahui pemetaan kekuatan UMKM di masing-masing region dan menciptakan 'internationalization awareness' dan peluang untuk berperan aktif dalam jaringan produksi GVC (Global Value Chains). Selanjutnya diikuti dengan tahapan penguatan UMKM (strengthening) dengan memberikan kebijakan secara terintegrasi di bidang permodalan, SDM, teknologi, pemasaran, diversifikasi pasar untuk meningkatkan daya saing dan inovasi.
- c. Meningkatkan 'strategic linkage' antara UMKM, Perusahaan dan Pemerintah melalui konsep 'triangle linkage.'
- d. Meningkatkan pemahaman bahwa internasionalisasi merupakan 'cross cutting issue' sehingga pembentukan kebijakan tidak lagi bersifat sektoral atau alokatif tetapi lebih bersifat terpadu dan harus dilakukan secara institusional untuk menjamin keberlangsungan (sustainability).

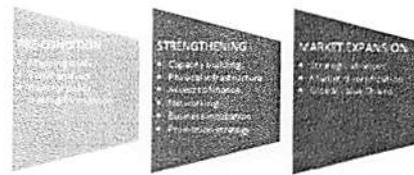


## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan secara teoritis (theoretical approach) maupun pendekatan empiris (empirical approach). Pendekatan teori dilakukan dengan menelaah/menganalisis secara kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah penelitian untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui survey dan wawancara dengan stakeholder terkait dengan isu hukum dalam penelitian.



Gambar 1: strategic linkage Internasionalisasi UMKM



Gambar 2: Internasionalisasi sebagai proses

**International Journal Submission (International Journal of Entrepreneurship  
and Small Business (IJESB))**



Publishers of distinguished academic, scientific and professional journals

Logged in as mrahmah [Logout]

You can:  
Submit and track articles  
Update your profile  
Change your password

[Home](#)   [For Authors](#)   [For Librarians](#)   [Orders](#)   [News](#)

[OSPEERS](#) > [User](#) > [Author](#) > [Track](#)

[Information](#)

Article ID	Article Title	Submission Date	Status	Action
IJGSB-226372		N/A	Incomplete (2nd Step)	<a href="#">Continue submission</a> or <a href="#">Delete submission</a>
IJESB-227393	THE INTERNATIONALIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: FROM FR...	05-Aug-2018	Waiting	<a href="#">View Review Progress</a>

#### Free sample articles:

- [Sample articles for IJGSB](#)
- [Sample articles for IJESB](#)

#### Submission Status:

- 1. Screening** - Your submission has been received and it is being screened to filter out unsuitable submissions. Contact [submissions@inderscience.com](mailto:submissions@inderscience.com) if you require further information.
- 2. Waiting** - Your submission has passed the screening process and has been admitted for peer-review where it is waiting for the review process to start. Contact the Journal Editor if you require further information.
- 3. Reviewing** - The first round of the peer-review of this article is in progress.
- 4. Revising** - Either the editor or the author is revising a version of the article.
- 5. Done** - The review process has been completed and the article has been either accepted or rejected.
- 6. Removed** - The article has been removed from the peer-review process at the request of the editor

Any submission that did not complete the five submission steps is given the status "Incomplete"

[us](#) | [About Inderscience](#) | [OAI Repository](#) | [Privacy and Cookies Statement](#) | [Terms and Conditions](#) | [Copyright](#)

© 2018 Inderscience Enterprises Ltd